



**BUPATI CIANJUR**

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 15 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07A Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016.
9. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

### Pasal 2

Sistematika Penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan:

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen;
- 1.4. Sistematika;
- 1.5. Maksud dan Tujuan.

Bab II Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan:

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah:
  - 2.1.1. Aspek Geografis;
  - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
  - 2.1.3. Aspek Pelayanan Pendidikan;
  - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD;
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah:

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah:
  - 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2015 dan Perkiraan Tahun 2016;
  - 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016.
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah:
  - 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah;
  - 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah;
  - 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah:

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan;
- 4.2. Prioritas Pembangunan:
  - 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional;
  - 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
  - 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kewilayahan;
  - 4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2016.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.  
Bab VI Penutup.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) RKPD bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, sektor pembangunan, dan tingkat pemerintahan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.
- (2) Sasaran RKPD adalah sebagai acuan dan pedoman pembangunan di daerah tahun 2016.
- (3) Fungsi RKPD adalah:
  - a. bagi OPD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja;
  - b. bagi Pemerintah Daerah merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Plafon Prioritas Anggaran Sementara dan rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun 2016.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 29 Mei 2015  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,



**OTING ZAENAL MUTAQIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR : 15 TAHUN 2015  
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2016

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Kabupaten Cianjur setiap tahun melakukan pembangunan daerah secara terencana menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Cianjur. Berbagai sumber daya yang ada dimanfaatkan dalam pembangunan tersebut yang perencanaannya tetap berpegang kepada azas prioritas, agar tujuan pembangunan dapat tercapai dan perencanaan dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya serta tepat waktu.

Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur berada dalam tahapan pelaksanaan lima tahun kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tahun berjalan 2015, Pemerintah Kabupaten Cianjur harus mulai serangkaian proses penyusunan rencana pembangunan tahun 2016 yang merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2011-2016. Pada akhir masa pembangunan jangka menengah tersebut, RKPD tahun 2016 perlu disusun secara cermat untuk menuntaskan permasalahan maupun target pembangunan sebagaimana terdapat dalam visi misi pembangunan jangka menengah pembangunan tahun 2011-2016.

Proses penyusunan RKPD tahun 2016 berdasarkan pada hasil evaluasi kinerja tahun 2014 dan tahun berjalan 2015 dimana tahun tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan nasional yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga dalam proses perencanaan harus disesuaikan dengan amanat yang telah tercantum dalam regulasi tersebut.

RKPD Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu, RKPD Tahun 2016 juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2016.

**1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan makro tahunan yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Kabupaten Cianjur. Penyusunan RKPD Tahun 2016 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016.



## **Bab II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

- 2.1 **Gambaran Umum Kondisi Daerah**  
Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan
- 2.2 **Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD**  
Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 2014 dan 2015 serta pencapaian indikator RPJMD Kabupaten Cianjur.
- 2.3 **Permasalahan Pembangunan Daerah**  
Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.

## **Bab III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1 **Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**
- 3.2 **Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

## **Bab IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan
- 4.1 **Tujuan dan Sasaran Pembangunan**
  - 4.2 **Prioritas Pembangunan Daerah**

## **Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas tahun 2016, instansi pelaksana OPD, Indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

## **Bab VI PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang memuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Dokumen RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2016. Adapun tujuannya sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Cianjur;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## BAB II

### EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

#### 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

##### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Luas wilayah Kabupaten Cianjur adalah 361.435,53 Ha, secara geografis berada di tengah Propinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 65 Km dari Ibu Kota Propinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta), dan terletak diantara 6°21'- 7°25' Lintang Selatan dan 106°42'- 107°25' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Sukabumi
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut

Kabupaten Cianjur terletak di kaki Gunung Gede dengan ketinggian antara 7 - 2.962 meter di atas permukaan laut. Secara geografis wilayah ini terbagi dalam 3 bagian yaitu:

1. **Cianjur Bagian Utara** : Merupakan dataran tinggi terletak di kaki Gunung Gede dengan ketinggian 2.962 meter, sebagian besar ini merupakan daerah dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan dataran yang dipergunakan untuk areal perkebunan dan pesawahan.
2. **Cianjur Bagian Tengah**, merupakan daerah yang berbukit-bukit kecil dikeliling dengan keadaan struktur tanahnya labil sehingga sering terjadi tanah longsor dan daerah inipun merupakan daerah gempa bumi, dataran lainnya terdiri dari areal perkebunan dan daerah persawahan.
3. **Cianjur Bagian Selatan**, merupakan dataran rendah akan tetapi terdapat banyak bukit-bukit kecil yang diselingi oleh pegunungan yang melebar sampai ke daerah pantai Samudra Indonesia, seperti halnya daerah Cianjur Bagian Tengah, bagian selatanpun tanahnya labil dan sering terjadi longsor dan daerah gempa bumi, disini terdapat pula areal untuk perkebunan dan pesawahan tetapi tidak begitu luas.

Kabupaten Cianjur memiliki garis pantai sepanjang 75 km dengan karakteristik sebagian besar adalah pantai berpasir membentang dari Kecamatan Agrabinta sampai Kecamatan Cidaun. Daratan tersebut dapat dibedakan atas karakteristik topografi yang terdapat di Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Dataran : Merupakan daerah dengan kemiringan lereng yang berkisar antara 0 - 8 % yang menempati daerah pantai, daerah alluvial sungai dan dataran lahar. Daerah yang termasuk satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi yang rendah yang terdistribusi pada daerah Sukaresmi, Cikalongkulon, Cianjur, Ciranjang, Bojong Picung, sebelah Utara Cibeber, Pagelaran, Tanggeung, Kadupandak, dan sepanjang Pantai Selatan mulai dari Agrabinta sampai Cidaun.

2. Perbukitan Berelief Halus : Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng 8 - 15% yang terdapat pada daerah Utara Pacet, Warungkondang, Takokak sebelah Barat, Cidaun, dan sebelah Timur Sindangbarang
3. Perbukitan Berelief Sedang : Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng 15 - 25% yang tersebar pada daerah Utara Mande, sebelah Selatan Kadupandak, dan sebelah Selatan Cibeber
4. Perbukitan Berelief Agak Kasar : Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 24 - 40% yang tersebar pada daerah Takokak, bagian Utara dan Selatan Kadupandak, bagian Utara Sukanagara, Agrabinta, sebelah Utara Cidaun, sebelah Selatan Pagelaran, dan sebelah Barat Tanggeung.
5. Perbukitan Berelief Kasar : Bentuk permukaan pada bagian ini adalah bergelombang kasar - sangat kasar dengan kemiringan lereng > 40 % yang terdistribusi pada daerah Selatan Sukaresmi, sebelah Selatan Bojong Picung, Sukanagara, Gunung Buleud, sebelah Timur Takokak dan Gunung Sambul. Timur Pagelaran, bagian Selatan dan Utara Kadupandak serta Karangtengah yang membentuk gawir gerakan tanah yang hampir tegak lurus. Daerah lain yang memiliki bentuk permukaan seperti ini adalah daerah Gunung Pangrango, Pasir Beser, Pasir Taman sampai Pasir Gambir, Pasir Negrog, Gunung Pondokcabang, Gunung Berenuk, dan Pasir Gook

Kabupaten Cianjur secara administratif terdiri dari 32 Kecamatan, dari 32 kecamatan tersebut, dibagi lagi menjadi 354 desa dan 6 kelurahan. Dari 360 desa/kelurahan tersebut terdapat 16 desa yang terletak di pesisir pantai serta 344 desa/kelurahan yang tidak berada di pesisir pantai.

Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 1.000 - 1.500 mm/tahun, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan jumlah harian hujan efektif selama 1 tahun adalah 100 - 150 hari, namun demikian cuaca di Kabupaten Cianjur khususnya dan di Indonesia pada umumnya sangat sulit diduga. Hal ini disebabkan oleh pemanasan global (*global warming*) yang merupakan fenomena alam yang belakangan menjadi isu yang diisyaratkan dan dipertimbangkan dalam pengembangan dan pembangunan wilayah di seluruh dunia. Dalam konteks Kabupaten Cianjur, dampak pemanasan global cenderung akan terasa di wilayah selatan yang berbatasan dengan Samudra Indonesia. Peningkatan muka air laut dan tidak menentukannya cuaca, merupakan salah satu dampak pemanasan global, berpengaruh pula terhadap kehidupan para nelayan dan petani dalam menentukan musim tanam.

Selain sumber daya alami, Kabupaten Cianjur memiliki situ dan waduk buatan diantaranya yaitu terdapat Waduk Cirata yang membendung Sungai Citarum dengan luas genangan mencapai 6.400 Ha. Waduk ini juga merupakan sumber air permukaan/penampung air yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas sekitar 550 MW jam/tahun serta pengembangan budidaya perikanan darat dan pariwisata.

Kabupaten Cianjur terdapat banyak sungai yang terbagi ke dalam dua bagian Daerah Aliran Sungai (DAS), yakni DAS Citarum dan DAS Cibuni-Cilaki. Sungai Citarum merupakan sungai utama yang mengalir ke bagian Utara dengan beberapa anak sungainya di Kabupaten Cianjur antara lain Sungai Cibeet, Sungai Cikundul, Sungai Cibalagung dan Sungai Cisokan.

Sungai Citarum melintasi beberapa kecamatan mulai dari kecamatan Bojongpicung yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Kecamatan Cikalongkulon yang berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Di beberapa daerah, air mengalir sepanjang tahun karena curah hujan cukup tinggi, sehingga pada musim kemarau tidak terlihat adanya kekeringan. Sungai-sungai yang mengalir mempunyai pola dendritik. Sungai Citarum merupakan sungai utama yang mengalir ke bagian utara dengan beberapa anak sungainya di Kabupaten Cianjur antara lain Sungai Cibeet, Sungai Cikundul, Sungai Cibalagung, dan Sungai Cisokan. Sungai-sungai tersebut membentuk sub-DAS yang merupakan bagian dari DAS Citarum yang bermuara di Laut Jawa. Di bagian selatan terdapat Sungai Cibuni, Sungai Cisokan, Sungai Cisadea, Sungai Ciujung, dan Sungai Cilaki yang merupakan sub DAS Cibuni - Cilaki yang bermuara di Samudera Indonesia.

Terdapat 3 (tiga) buah waduk yang memanfaatkan aliran Sungai Citarum yaitu Jatiluhur, Cirata, dan Saguling. Waduk Cirata mempunyai luas genangan 6.400 ha, dimana + 3.400 ha menggenangi wilayah Kabupaten Cianjur. Genangan tersebut merupakan sumber air permukaan / penampung air yang dapat dimanfaatkan sebagai pengairan persawahan, pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas sekitar 550 MW jam/tahun serta pengembangan budidaya perikanan darat dan pariwisata.

Selain sungai, potensi air permukaan di Kabupaten Cianjur adalah adanya situ/rawa yang terdapat di Kecamatan Pagelaran, Tanggeung, Cibinong dan Kadupandak. Terdapat sekitar 16 situ/rawa mencakup luas + 33,50 Ha dengan perkiraan volume air 594.300 m<sup>3</sup> dan mampu mengairi sawah + 1.431 Ha. Air permukaan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan air minum, industri, pertanian, dan lain-lain.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana alam. Sebanyak 15 titik rawan bencana tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur. Dari 15 titik wilayah yang rawan bencana hasil dari pemetaan, terbagi atas tiga kategori. Diantaranya, daerah rawan longsor yang terdapat di 9 kecamatan, rawan gunung berapi di 3 kecamatan, dan rawan tsunami di 3 kecamatan. Akibatnya, pengguna ruang Kabupaten Cianjur yang cenderung semakin intensif menjadikan kondisi fisik kawasan terbangun dan kawasan budidaya semakin rentan terhadap bencana. Sekali kondisi fisik yang rentan, struktur bangunan rumah, Gedung, maupun infrastruktur juga memperparah keadaan karena cenderung tidak tahan gempa dan tidak tahan gerakan tanah, serta konstruksinya tidak ramah banjir.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Cianjur, jumlah penduduk tahun 2013 hasil proyeksi adalah 2.225.313 jiwa yang terdiri dari 1.146.669 jiwa laki-laki dan 1.078.644 jiwa perempuan dengan sex ratio 106,31. Secara umum didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Adapun kelompok usia produktif (15 - 64 tahun) sebanyak 64,97 persen sedangkan penduduk usia non produktif (0-14 ditambah 65 tahun ke atas) sebesar 35,05 persen.

Tabel 2.1

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Kabupaten Cianjur Tahun 2013**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
0 - 14 tahun	339.997	323.575	663.572
15 - 64 tahun	751.804	694.012	1.445.816
> 65 tahun	54.868	61.057	115.925
<b>Jumlah</b>	<b>1.146.669,32</b>	<b>1.078.644</b>	<b>2.225.313</b>

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2013 adalah sebesar 0,52 persen. Adapun sex rasionya sebesar 106,31 yang artinya penduduk laki-laki di Kabupaten Cianjur lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), sekitar dua pertiga penduduk Kabupaten Cianjur termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami sedikit kenaikan selama periode 2006-2013 dari 66,5 persen menjadi 65,66 persen. Tingkat pengangguran terlihat semakin menurun selama kurun waktu 2007-2013. Pada tahun 2007 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 13,82 persen. Angka ini menurun menjadi 11,26 persen pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 14,18. Mencermati perkembangan tingkat pengangguran ini selama kurun waktu enam tahun terakhir masih tergolong tinggi, dibandingkan pada tahun 2006 yaitu hanya sebesar 8,23 persen.

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator-indikator: pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, indeks gini, dan persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

Tabel 2.2

**Indikator Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi**

<b>Indikator Ekonomi</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>PDRB</b>					
❖ Berlaku (Rp. Juta)	18.435.749,66	20.573.046,71	22.267.596,59	24.893.206,21	28.068.776,24
❖ Konstan (Rp. Juta)	8.299.833,7	8.693.509	9.134.765,41	9.561.319,14	10.055.716,83
<b>Pertumbuhan PDRB</b>	4,54	4,74	5,08	4,67	5,17
<b>PDRB perkapita</b>	8.434.274	9.390.766	10.027.345	11.109.536	
<b>Indeks Gini</b>			0,329		
<b>Angka Kemiskinan</b>	14,32	13,82	13,17	12,02	11,25

Berdasarkan tabel di atas, nilai PDRB baik berdasarkan harga konstan maupun berlaku dari 2010 hingga 2014 terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Nilai PDRB harga berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp. 18.435.749,66 juta telah meningkat menjadi Rp. 28.068.776,24 juta pada tahun 2014, sedangkan nilai PDRB harga konstan pada tahun 2010 sebesar Rp. 8.299.833,7 juta telah meningkat menjadi Rp. 10.055.716,83 juta pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan yang dapat dicapai setiap tahunnya adalah sebesar 4,84. Adapun menurut perkembangan PDRB di 9 sektor lapangan usaha, dominasi nilai PDRB masih didominasi sektor pertanian, seperti dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

### 1. Pertumbuhan PDRB

Gambaran pertumbuhan PDRB secara sektor lapangan usaha tahun 2012 hingga 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Secara umum, 9 sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif baik atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Sektor pertanian masih menjadi sektor dengan nilai PDRB terbesar yaitu sebesar 9,21 triliun rupiah atau sebesar 37 persen pada tahun 2013.

**Tabel 2.3**  
**Perkembangan Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2012 – 2014**  
**Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan**  
**Kabupaten Cianjur**

No	Sektor	2012)*		2013)**		2014)***	
		Hk(Juta Rupiah)	Hb (Juta Rupiah)	Hk (Juta Rupiah)	Hb (Juta Rupiah)	Hk(Juta Rupiah)	Hb (Juta Rupiah)
1	Pertanian	3.832.315,50	8.252.295,46	3.949.274,60	9.209.425,94	4.056.192,28	10.108.253,68
2	Pertambangan & Penggalian	10.462,88	26.134,30	10.981,23	29.439,11	11.625,12	32.695,57
3	Industri Pengolahan	270.596,70	864.277,74	285.862,33	943.319,62	334.661,53	1.146.131,60
4	Listrik, Gas & Air bersih	76.681,38	239.598,70	81.044,79	278.433,59	92.143,18	334.456,26
5	Konstruksi	316.366,86	803.968,22	339.566,85	903.375,07	389.956,47	1.083.581,69
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	2.550.617,09	6.103.217,46	2.713.191,07	6.898.115,80	2.888.157,55	7.975.022,29
7	Pengangkutan & Komunikasi	694.780,66	2.132.460,32	735.203,30	2.480.234,56	779.531,97	2.903.479,56
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	470.758,18	890.394,20	495.869,34	975.012,30	520.616,20	1.062.168,71
9	Jasa-jasa	912.437,24	2.955.250,19	950.325,63	3.175.850,22	982.832,53	3.422.986,86
	PDRB	9.134.765,41	22.267.596,59	9.561.319,14	24.893.206,21	10.055.716,83	28.068.776,24

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur

\*) Angka Perbaikan

\*\*\*) Angka sementara

\*\*\*\*) Angka sangat sementara

Berdasarkan kontribusi sektor, terlihat bahwa semua sektor mengalami pertumbuhan fluktuatif selama 3 tahun terakhir. Sektor yang mengalami peningkatan yaitu sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, hotel dan Restoran, Konstruksi. Sedangkan sektor jasa-jasa cenderung mengalami penurunan. Khusus untuk sektor pertambangan dan penggalian relatif stabil selama 3 tahun terakhir.

**Tabel 2.4**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 - 2014**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)**  
**Kabupaten Cianjur**

NO	Sektor	2012)*		2013)**		2014)***	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	37,06	41,95	37,00	41,30	36,01	40,34
2	Pertambangan & Penggalian	0,12	0,11	0,12	0,11	0,12	0,12
3	Industri Pengolahan	3,88	2,96	3,79	2,99	4,08	3,33
4	Listrik, Gas & Air bersih	1,08	0,84	1,12	0,85	1,19	0,92
5	Konstruksi	3,61	3,46	3,63	3,55	3,86	3,88
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	27,41	27,92	27,71	28,38	28,41	28,72
7	Pengangkutan & Komunikasi	9,58	7,61	9,96	7,69	10,34	7,75
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	4,00	5,15	3,92	5,19	3,78	5,18
9	Jasa-jasa	13,27	9,99	12,76	9,94	12,19	9,77
	PDRB	100,00	100,00	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur

\*) Angka Perbaikan

\*\*\*) Angka sementara

\*\*\*\*) Angka sangat sementara

**Tabel 2.5**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)**  
**dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 - 2014**  
**Kabupaten Cianjur**

NO	Sektor	2012)*		2013)**		2014)***	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	6,83	4,56	11,60	3,05	9,76	2,71
2	Pertambangan & Penggalian	2,21	2,40	12,65	7,53	11,06	5,86
3	Industri Pengolahan	10,94	6,15	9,15	5,64	21,50	17,07
4	Listrik, Gas & Air bersih	7,28	4,23	16,21	5,69	20,12	13,69
5	Konstruksi	10,90	8,52	12,36	7,33	19,95	14,84
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	9,79	5,85	13,02	6,37	15,61	6,45
7	Pengangkutan & Komunikasi	7,10	5,54	16,31	5,82	17,06	6,03
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	10,34	5,20	9,50	5,33	8,94	4,99
9	Jasa-jasa	8,08	3,41	5,97	4,15	7,78	3,42
	PDRB	8,32	5,08	11,79	4,67	12,76	5,17

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur

\*) Angka Perbaikan

\*\*\*) Angka sementara

\*\*\*\*) Angka sangat sementara

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan, hampir semua sektor lapangan usaha mempunyai laju pertumbuhan yang berfluktuatif. Beberapa sektor mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu sektor Industri pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan hotel dan restoran, Konstruksi dan jasa-jasa, listrik, gas dan air bersih. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah sektor Keuangan, sewa dan jasa perusahaan dan pertanian. Hanya sektor konstruksi yang terus mengalami pertumbuhan positif selama 3 tahun.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2012, kinerja kelompok sektor primer yang ditopang oleh sektor pertanian mengalami pertumbuhan fluktuatif. Meski sektor pertambangan dan penggalian yang juga termasuk ke dalam kelompok sektor primer, mengalami kenaikan, akan tetapi dari kontribusi terhadap PDRB tidak signifikan (0,12%). Sedangkan kelompok sektor sekunder dan tersier umumnya mengalami kenaikan laju pertumbuhan pada tahun 2012. Hal sebaliknya terjadi pada tahun 2013 dimana sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan positif. Meski demikian, selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur terus mengalami kenaikan positif.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kinerja sektor pertanian tidak serta merta berpengaruh terhadap kinerja sektor lain. Bahkan ketika sektor pertanian mengalami penurunan, sektor sekunder dan tersier mampu berperan sebagai substitutor pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga memperlihatkan bahwa sektor pertanian belum mengalami proses nilai tambah dalam rantai perekonomian di Cianjur.

**Tabel. 2.6**  
**Perkembangan PDRB Per Kapita Tahun 2008 s.d 2012**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)**  
**Kabupaten Cianjur**

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011)*	2012)**
		(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)
1	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	7.061.238,03	7.539.532,84	8.490.724,90	9.362.573,14	10.022.633,97
2	PDRB per kapita atas dasar harga konstan	3.481.032,24	3.576.671,17	3.822.574,64	3.956.322,86	4.111.553,30

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur

\*) Angka perbaikan.

\*\*) Angka sangat sementara

## 2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita dapat dijadikan indikator kasar yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran suatu wilayah. Dari Tabel di atas, memperlihatkan perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Cianjur pada tahun 2008 hingga 2012 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan yang terus mengalami kenaikan. Kondisi ini menggambarkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur selama kurun waktu tersebut. Namun, tingkat kesejahteraan tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut dengan indikator makro lainnya seperti Gini Ratio.

### 3. Laju Inflasi

Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Cianjur secara khusus tidak pernah dipantau oleh BPS. Di Provinsi Jawa Barat, BPS hanya memunculkan data IHK meliputi 7 kota saja yaitu Kota Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Bekasi, Bogor, Sukabumi dan Depok. Laju Inflasi yang digunakan sebagai asumsi adalah laju inflasi Provinsi Jawa Barat.

Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, nilai inflasi Provinsi Jawa Barat cenderung berfluktuatif. Naik turunnya nilai inflasi sangat berkaitan dengan kondisi makro ekonomi nasional. Untuk tahun 2013 dapat diasumsikan nilai inflasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari inflasi per bulan Oktober 2013 yang telah mencapai 8,88 persen. Pengaruh defisit neraca berjalan nasional yang dipengaruhi kinerja ekspor impor pemerintah, volatilitas nilai rupiah dan situasi perekonomian global memberikan tekanan terhadap inflasi tahun 2013. Hal tersebut juga mengakibatkan hampir semua asumsi makro ekonomi nasional mengalami revisi. Kabupaten Cianjur diperkirakan laju inflasi pada tahun 2016 dalam kisaran 5-6 persen sesuai perhitungan rata-rata inflasi dari tahun 2010-2013.

**Tabel 2.7**  
**Nilai inflasi rata-rata Tahun 2010-2013**  
**Provinsi Jawa Barat**

Uraian	2010	2011	2012	2013)*	Rata-rata inflasi
Inflasi	6,46	3,10	3,86	8,88	5,57

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

\*) angka inflasi sampai bulan Oktober 2013

#### A. Fokus Kesejahteraan Sosial

Nilai PDRB baik berdasarkan harga konstan maupun berlaku dari 2010 hingga 2014 terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Nilai PDRB harga berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp. 18.435.749,66 juta telah meningkat menjadi Rp. 28.068.776,24 juta pada tahun 2014, sedangkan nilai PDRB harga konstan pada tahun 2010 sebesar Rp. 8.299.833,7 juta telah meningkat menjadi Rp. 10.055.716,83 juta pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan yang dapat dicapai setiap tahunnya adalah sebesar 4,84.

#### 1. Angka melek huruf

Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Cianjur meningkat 0,35% dari Tahun 2012 yaitu 97,67% menjadi 98,02% di Tahun 2013.

**Tabel 2.8**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 - 2013**

No.	Uraian	2011	2012	2013
3	Angka melek huruf (persen)	97,64	97,67	98,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

## 2. Angka rata-rata lama sekolah

Hasil analisis angka rata-rata lama sekolah selama 3 tahun mengalami peningkatan, yaitu meningkat 0,01% dari tahun 2012 ke tahun 2013.

**Tabel 2.9**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011- 2013 Kabupaten Cianjur**

No.	Uraian	2011	2012	2013
1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	6,85	6,87	6,88

Sumber: BPS RI

## B. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya, dan olahraga terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olah raga di Kabupaten Cianjur dapat ditinjau melalui pendekatan indikator jumlah grup kesenian, penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah gelanggang/balai remaja, dan jumlah lapangan olahraga.

Perkembangan jumlah grup kesenian mengalami peningkatan, meski tidak signifikan. Tercatat hingga tahun 2013 grup kesenian yang ada di Kabupaten Cianjur adalah 37 grup. Sedangkan festival seni dan budaya selalu diselenggarakan setiap tahunnya. Selanjutnya jumlah gelanggang/balai remaja masih cukup sedikit. Namun untuk jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Cianjur cukup banyak, yaitu berjumlah 872 lapangan olahraga. Kabupaten Cianjur masih belum memiliki arena *Sport Center* yang memadai, oleh karena itu perlu diupayakan untuk dapat meningkatkan "*multiflier effect*" terhadap hasil-hasil pembangunan terutama dampak sosial ekonomi masyarakat.

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

#### A. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

### 1. Pendidikan

Pembangunan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesuksesan dan keseimbangan pembangunan nasional yang telah digariskan, pembangunan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas yang harus diperhatikan dan dirancang sedemikian rupa serta berdasarkan pemikiran yang matang untuk mengimbangi lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendunia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat vital serta merupakan suatu wadah yang sangat tepat di dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta harus menjadi prioritas secara optimal dan berkesinambungan.

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2012 adalah 95,82% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8 indikator yang telah ditetapkan terdapat 5 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP dan 2 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 3 indikator melebihi target, 5 indikator belum memenuhi target target yang telah ditetapkan namun 2 diantaranya termasuk ke dalam kriteria BAIK.

## **2. Kesehatan**

Dalam RPJMD bidang kesehatan telah ditetapkan 9 sasaran strategis. Dalam penilaian Lakip 2013 pada umumnya mendapat kriteria baik meskipun masih ada yang berkriteria kurang sehubungan capaian indikatornya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis yang masih perlu mendapatkan perlakuan khusus guna mencapai target indikator yang telah ditetapkan adalah : Terwujudnya masyarakat proaktif memelihara & meningkatkan derajat kesehatan, partisipasi aktif menolong dirinya serta membudayakan PHBS dalam keluarga dan masyarakat.

Catatan khusus yang harus menjadi fokus perhatian lintas sektor dalam penyusunan perencanaan & penganggaran sektor kesehatan adalah berkaitan dengan program penanggulangan penyakit menular khususnya penyakit AIDS/HIV yang telah menjadi kometmen internasional melalui MDGs. Pemda perlu meningkatkan komitmen dalam melakukan mobilisasi aksi yang nyata untuk mencegah dan menanggulangi AIDS. Mengingat dukungan anggaran yang sangat minim diharapkan kedepan dukungan anggaran pemda dapat lebih optimal sehubungan bantuan dari Global Fund akan berakhir pada bulan Juni 2015.

## **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Indikator aspek pelayanan umum urusan wajib pekerjaan umum di Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari beberapa indikator, dengan rincian sebagai berikut:

- Indikator pertama adalah proporsi jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan. Persentase jalan desa mantap menuju sarana pendidikan ini pada kondisi awal tahun 2011 adalah 6,70% atau 331,882 km.
- Indikator kedua adalah jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana kesehatan. Persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan ini kondisi tahun 2011 adalah 1,24% atau 66,376 km.
- Indikator ketiga adalah proporsi infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agribisnis dimana pada tahun 2011 adalah 13,56% atau 174,971 km.
- Indikator keempat adalah ketersediaan sarana dan prasarana utilitas pendukung kegiatan pusat layanan, dimana angka ketersediaan sarana dan prasarana utilitas pendukung kegiatan pusat pelayanan pada tahun 2012 mengalami peningkatan, dari target 2,12% dapat direalisasikan 12,5%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 589,62%.

- Indikator kelima adalah kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis, di Kabupaten Cianjur pada tahun 2012 mengalami penurunan 3,14% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 47 %.
- Indikator keenam adalah Prosentase sawah terairi, dimana luas areal persawahan di Kabupaten Cianjur tahun 2012 mencapai 10.719 ha dan sawah yang terairi meliputi luas areal 8.678 ha atau 80,96% mengalami peningkatan 1,16% dari tahun 2011.
- Indikator ketujuh adalah penataan Pemakaman Muslim dan Non Muslim, dimana Luas areal pemakaman muslim dan non muslim pada tahun 2012 mengalami peningkatan 2,8 ha dari 17,5 ha pada tahun 2011. Lokasi penambahan pemakaman tersebut di Desa Cikareo Kecamatan Sukaresmi.

Untuk urusan wajib pentaan ruang indikator kinerja yang menjadi aspek penilaian adalah indikator meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang di-Perda-kan, indikator tersedianya informasi mengenai RTRW Kabupaten Cianjur, indikator ketaatan terhadap RTRW, dan indikator RTH per-satuan luas wilayah perkotaan. Indikator meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang di-Perda-kan, pada tahun 2012 mencapai 0%. Dari target 4 dokumen dapat direalisasikan 0 dokumen. Tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan tersebut dikarenakan dokumen-dokumen tersebut masih dalam proses perbaikan dan revisi dan akan dilanjutkan prosesnya pada tahun 2013.

Capaian ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2012 mencapai 100% dari target 95% dapat direalisasikan 95%. Ketaatan tersebut dapat dilihat dari rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Cianjur atas usulan perijinan dan penanaman modal yang disesuaikan dengan Perda RTRW. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap RTRW, kemungkinan perijinan yang dikeluarkan sebelum adanya Perda RTRW.

Luas RTH hanya dihitung dari RTH Perkotaan Rasio perhitungannya didasarkan pada luas RTH perkotaan dibagi luas seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Cianjur. Adapun luas RTH diambil dari laporan RTH wilayah perkotaan yang merupakan luas lahan tidak terbangun. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 luas eksisting RTH di kawasan perkotaan seluas 3.876,3 ha dari total luas kawasan perkotaan seluas 26.248 ha yang meliputi Kecamatan Cianjur (ditambah beberapa desa di Kecamatan Karangtengah dan Cilaku), Warungkondang, Ciranjang, Pagelaran, Sindangbarang Sukanagara Pacet, Cipanas dan Cidaun. Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 101,86%. Capaian tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan baik tahun 2012 maupun target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya. Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Dalam urusan wajib sektor perumahan tiga indikator kinerja yang dinilai di antaranya adalah indikator jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas, indikator persentase rumah tinggal bersanitasi, dan indikator rumah tinggal layak huni. Indikator-indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah pengguna air bersih, dan sanitasi pada tahun tertentu, dibagi jumlah keseluruhan rumah tangga/KK pada tahun tertentu dikali 100%.

Untuk jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas pada tahun 2012 adalah 99,28%. Indikator tersebut mencakup pelayanan air bersih perdesaan dan air bersih IKK (Ibu Kota Kecamatan) dengan target pelayanan air bersih perdesaan sebanyak 300 desa. Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja indikator tersebut antara lain adanya bantuan provinsi untuk pembangunan IKK Pagelaran yang berkontribusi terhadap 1.830 RT yang memiliki akses air bersih yang berkualitas.

Indikator kedua yaitu rumah tinggal bersanitasi, Berdasarkan data BPS tahun 2012 yang menggunakan hasil susenas tahun 2011, diperoleh 2 data jumlah rumah tinggal yang berbeda yaitu dari Kabupaten Cianjur Dalam Angka Tahun 2012 yaitu 599.349 KK sedangkan pada lampiran Statistik Kabupaten Kabupaten Cianjur halaman 23 diperoleh data jumlah rumah tangga 640.595 KK. Dengan demikian capaian kinerja indikator rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2012 yaitu 96,92%. Sedangkan untuk Indikator rumah layak huni dihitung berdasarkan jumlah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga didapatkan angka jumlah rumah layak huni pada tahun 2012 mengalami peningkatan 12,39% dari tahun 2011.

## **5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggaran dan kondisi trantibum) pada tahun 2012 dapat dilaksanakan di 6 lokasi dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 12 lokasi, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengamankan asset negara, menciptakan kondisi yang aman, tertib, terkendali dan kondusif dimasyarakat serta menekan tindakan perilaku kriminal/kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dapat diselesaikan sebanyak 55 kasus sesuai dengan jumlah yang diadukan. Apabila dibandingkan dengan penyelesaian pelanggaran K3 pada tahun 2012 sebanyak 60 kasus yang telah diselesaikan. Terjadinya penurunan tersebut karena telah dilaksanakan koordinasi antara PPNS Satpol PP dengan dinas/instansi terkait untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, diantaranya : pelanggaran ijin pertambangan umum, IMB, SITU/HO (ijin gangguan), perda retribusi, reklame, air bawah tanah, perda tentang larangan pelacuran dan perda K-3.

Dalam hal penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh aparat Satpol PP dengan Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk dari tahun 2012 sampai 2013 mengalami peningkatan dari rasio awal 1,06 menjadi 2,65. Pada dasarnya tidak mengalami penambahan personil yaitu sebanyak 265 orang. Jumlah personil Satpol PP saat ini masih belum sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sebanyak 2.250.305 jiwa pada tahun 2013. Dengan adanya penambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun tetapi jumlah personil Satpol PP belum tentu akan bertambah dikarenakan proses rekrutmen yang sangat sulit baik untuk PNS maupun non PNS.

## **6. Sosial**

Persentase PMKS yang dibina pada tahun 2012 sebesar 13,65% dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 15,32%. Dengan jumlah PMKS sebanyak 161.013 dan yang dapat dibina sampai dengan tahun 2013 sebanyak 21.974 dimana sebelumnya pada tahun 2012 sebanyak 21.974 dimana terjadi peningkatan jumlah yang dibina yaitu sebanyak 2.703.

Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah dari tahun 2012 sampai dengan 2013 belum mengalami peningkatan yaitu masih berjumlah 30 panti asuhan dan panti sosial non pemerintah. Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2013 belum mengalami peningkatan, dengan jumlah kelompoknya masih sama yaitu 5 kelompok. Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada lingkungan tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 belum mengalami peningkatan jumlah lembaga, yaitu masih terdapat 43 lembaga.

Penyelesaian dokumen tentang kebijakan di bidang sosial belum dibuat sampai dengan tahun 2013. Ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif pada tahun 2012 terdapat 3 sistem yang dapat diselesaikan, sedangkan untuk tahun 2013 sistem yang dapat diselesaikan 1 sistem yaitu penyusunan dokumen prosedur penanganan keadaan darurat bencana, dengan demikian telah tersedia 4 sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif.

### **B. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu : tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

#### **1. Tenaga Kerja**

Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja pada tahun 2012 terdapat 3,34% yang terserap dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 4,20% yang terserap. Penyerapan tenaga kerja tersebut meningkat karena didukung oleh adanya penyelenggaraan pelatihan, pemberdayaan maupun pemberian kerja sementara (padat karya) baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek pada tahun 2012 berjumlah 15.840 pekerja dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 20.900 pekerja.

Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja tahun 2013 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2012 sebesar 13% (1.030 dari jumlah 7.730 siswa yang lulus) sedangkan pada tahun 2013 sebesar 14% (1.134 dari jumlah 8.097 siswa yang lulus). Hal itu dapat meningkat dikarenakan diadakannya workshop oleh pihak swasta dan dilaksanakannya kerjasama antara sekolah dengan perusahaan-perusahaan swasta baik di dalam maupun di dalam negeri maupun diluar negeri.

Berdasarkan data tahun 2013 diketahui bahwa Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 0,44% (261 siswa) pada tahun 2012 menjadi 0,41% (206 siswa) pada tahun 2013. Dari data sebelumnya dapat diketahui bahwa masih adanya siswa yang putus sekolah dan hal ini oleh Pemerintah harus segera mendapat perhatian, program apa yang harus dilaksanakan bagi para siswa yang telah putus sekolah, berkaitan dengan usia siswa yang sudah berusia 15 tahun ke atas untuk bekerja di sektor usaha. Hal ini berkaitan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur serta masih mahal biaya sekolah bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

## **2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara komprehensif terilustrasikan dalam 2 sasaran strategis pada misi ke 2, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, dengan indikator kinerja :
  - Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
  - Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
  - Penanganan korban trafficking
  - Rasio KDRT
2. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, dengan indikator kinerja :
  - Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan.
  - Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.
  - Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan mencapai 43,18% termasuk dalam kriteria KURANG. 3 indikator yang telah ditetapkan termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya, 2 indikator melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak mencapai 121,53% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja ketiga indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penilaian di atas, dimasa datang, seiring dengan meningkatnya pembangunan yang diikuti dengan semakin terbukanya lapangan pekerjaan baru di satu sisi namun disisi lain menuntut adanya kualitas pendidikan serta ketrampilan yang lebih tinggi. Kondisi ini menuntut perlunya akselerasi kualitas pendidikan dan ketrampilan kaum perempuan secara utuh agar tidak tersisihkan dalam persaingan tenaga kerja.

### 3. Pangan

Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu, Sektor Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Cianjur masih bergantung pada produktivitas padi. Bisa dilihat dari jumlah produktivitas padi dengan capaian tahun 2013 yaitu 61,76 kw/ha termasuk dalam kriteria BAIK, mengalami peningkatan dari tahun 2012 dengan hasil 56,35 kw/ha. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 98,53%.

### 4. Pertanahan

Sertifikasi asset (tanah) milik daerah pada tahun 2012 baru diselesaikan sebanyak 49,50%, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sertifikasi menjadi 50,52%, dengan penambahan persentase sebanyak 1,02%. Peningkatan tersebut masih kecil dikarenakan proses pensertifikatan asset/tanah membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Luas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial pada tahun 2012 telah dilaksanakan sebesar 44.822 m<sup>2</sup>, pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 64.243 m<sup>2</sup> dengan jumlah penambahan luas tanah dari tahun sebelumnya sebesar 19.421 m<sup>2</sup>.

### 5. Lingkungan Hidup

Arus perpindahan dan konsentrasi manusia di Kabupaten Cianjur akan selalu menimbulkan persoalan, terutama persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dari proses pembangunan kiranya perlu diminimalkan melalui suatu paradigma pembangunan yang akrab lingkungan. Untuk mewujudkannya maka pada aspek pelayanan umum urusan wajib lingkungan hidup telah ditetapkan sasaran strategisnya berupa : **Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.**

Rata-rata capaian kinerja dari sasaran ini menurut LAKIP mencapai 158,95% dan termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun indikator kinerja yang menjadi pendukungnya adalah : persentase berkurangnya penambang liar, persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku, Persentase jumlah ren-cana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH (AMDAL/UKL/UPL/SPPL), RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata), Persentase penanganan sampah, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan terpeliharanya konservasi kawasan lindung.

Persentase berkurangnya penambang liar pada tahun 2013 adalah 73,87%, sedangkan Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku pada tahun 2013 sebesar 100%, dari 28 permohonan ijin dan seluruhnya telah diterbitkan.

Jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dokumen LH pada tahun 2013 bertambah 78 buah dari 327 buah pada tahun 2012. Peningkatan tersebut disebabkan karena banyaknya jumlah pemilik/penanggungjawab kegiatan usaha yang mengajukan perijinan legalitas kegiatan usahanya, serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran penanggung jawab kegiatan tersebut untuk menyusun dokumen lingkungan hidup sebagai bagian dari perencanaan kegiatannya yang merupakan salah satu prasyarat untuk mengurus ijin operasional yang dibutuhkan dari Dinas/Instansi terkait. Hal ini juga mengindikasikan banyaknya investasi usaha/kegiatan yang muncul selama tahun 2013 dan menunjukkan komitmen dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin operasional usaha/kegiatan untuk turut serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Luas eksisting RTH di kawasan perkotaan mengalami peningkatan 35,359 ha dari seluas 3.876,3 ha pada tahun 2012 menjadi 3.911,659 ha dari total luas kawasan perkotaan seluas 26.248 ha yang meliputi Kecamatan Cianjur (ditambah beberapa desa di Kecamatan Karangtengah dan Cilaku), Warungkondang, Ciranjang, Pagelaran, Sindangbarang Sukanagara Pacet, Cipanas dan Cidaun. Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 110,37%.

Persentase penanganan sampah mengalami peningkatan dari 42% menjadi 47% pada tahun 2013. Namun, dari target 15% di Tahun 2013 dapat direalisasikan 5% dengan capaian kinerja 33,33%. Belum terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan dikarenakan sarana pengangkut sampah yang ada masih belum memadai walaupun pada tahun 2012 telah dilakukan penambahan jumlah sarana pengangkut sampah dari 19 unit menjadi 21 unit dengan kondisi:

- Baik : 2 Unit
- Sedang : 17 Unit
- Rusak : 2 Unit

Dengan kondisi sarana yang ada tersebut, cakupan wilayah penanganan sampah di Kabupaten Cianjur baru 11 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Haurwangi
2. Kecamatan Ciranjang
3. Kecamatan Karangtengah
4. Kecamatan Sukaluyu
5. Kecamatan Cugenang
6. Kecamatan Pacet
7. Kecamatan Gekbrong
8. Kecamatan Cilaku
9. Kecamatan Warungkondang
10. Kecamatan Cianjur
11. Kecamatan Cipanas

Realisasi kinerja tempat pembuangan sampah per satuan penduduk pada tahun 2013 mencapai 28,38 % diperoleh dari kapasitas TPS dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 638.750 m<sup>3</sup> dibagi jumlah penduduk yaitu 2.250.305 jiwa mengalami peningkatan dari tahun 2012. Dengan demikian capaian kinerjanya yaitu 71,00%.

Terpeliharanya konservasi kawasan lindung mengalami peningkatan dari 0,93% pada tahun 2012 menjadi 1,76% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 1% dapat direalisasikan 0,83% dengan capaian kinerja 83%.

## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Adapun gambaran umum tentang pelayanan untuk kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan KTP. Target kepemilikan KTP (e-KTP) pada tahun 2013 yaitu 100% atau 1.627.262 orang, dapat direalisasikan 76,37% atau 1.232.909 orang dengan capaian kinerja 76,37%.
2. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk. Target kepemilikan akta kelahiran per 100 penduduk pada tahun 2013 yaitu 296,29, dapat direalisasikan 339,47 dengan capaian kinerja 114,57%.
3. Kepemilikan kartu keluarga. Target kepemilikan kartu keluarga pada tahun 2013 yaitu 69,77, dapat direalisasikan 73,41% dengan capaian kinerja 105,22%.

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat mencapai 116,78% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 43 indikator yang telah ditetapkan 32 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP, 9 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 14 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 17 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 12 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Adapun gambaran pelayanan umum untuk pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

1. Prosentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target lima tahun ke depan (%). Persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target 5 tahun ke depan pada tahun 2012 mencapai 100%. Dari target 20% dapat direalisasikan seluruhnya. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%.
2. Prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai target lima tahun ke depan (%). Persentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target 5 tahun ke depan pada tahun 2012 mencapai 100%. Dari target 5% dapat direalisasikan seluruhnya.
3. Kebijakan tentang pemerintahan desa (DOKUMEN). Ketersediaan profil desa yang valid pada tahun 2012 mencapai 45,76%. Dari target 354 desa dapat direalisasikan 162 desa.
4. Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif. Persentase jumlah rukun tetangga (RT) kreatif pada tahun 2012 mencapai 100%. Dari target 10.402 RT yang direncanakan mendapatkan stimulan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, seluruhnya dapat direalisasikan.

## **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Adapun gambaran umum tentang keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata jumlah anak per keluarga Rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2012 tidak ada peningkatan dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%.
2. Rasio akseptor KB. Rasio akseptor KB pada tahun 2012 tidak ada peningkatan dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%.

3. Cakupan peserta KB aktif. Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2012 mengalami peningkatan 1,66% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 102,42%.
4. Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja per tahun. Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja pada tahun 2012 tidak ada peningkatan dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%.
5. Persentase keluarga yang mengetahui kesehatan kesehatan reproduksi remaja. Persentase keluarga yang mengetahui kesehatan reproduksi remaja pada tahun 2012 tidak ada peningkatan dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%.
6. Persentase pusat informasi dan konseling remaja per kecamatan. Persentase pusat informasi dan konseling remaja per kecamatan pada tahun 2012 mengalami peningkatan 2 % dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 102,94%.

## 9. Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Target kinerja persentase cakupan ketersediaan fasilitas sampai dengan tahun 2012 yaitu meningkat 28,55% dari 54,45% pada tahun 2011. Target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2012 yaitu mengalami peningkatan 28,06% dari tahun 2011 dan realisasi yang diperoleh pada tahun 2012 yaitu 100%. Sampai dengan tahun 2012 persentase cakupan ketersediaan fasilitas mencapai 82,51%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 98,3%.

Target kinerja efektivitas pelayanan angkutan sampai dengan tahun 2016 yaitu meningkat 13,34% dari 83,33% pada tahun 2011. Target kinerja pada tahun 2012 yaitu meningkat 3,34% (25% dari 13,34%) dari 83,33% pada tahun 2011 dengan capaian kinerja mencapai 100%. Sampai dengan tahun 2012 efektivitas pelayanan angkutan mencapai 86,67%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 25%.

Target kinerja persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas sampai dengan tahun 2016 yaitu meningkat 36% dari 64% pada tahun 2011. target dan realisasi pada tahun 2012 mencapai 100%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan kinerja pada tahun berikutnya. Target kinerja persentase upaya kelaikan keselamatan kendaraan sampai dengan tahun 2016 yaitu meningkat 16,67% dari 83,33% pada tahun 2011. Target kinerja pada tahun 2012 yaitu meningkat 11,11% dari 83,33% pada tahun 2011 dengan capaian kinerja tahun 2012 mencapai 100%. Sampai dengan tahun 2012 persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan mencapai 94,44%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 66,66%.

Dan indikator terakhir dari urusan wajib ini, persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas, dimana sampai dengan tahun 2016 yaitu meningkat 18,87% dari 41,59% pada tahun 2011. Target kinerja pada tahun 2012 yaitu meningkat 0,74% dari 41,59% pada tahun 2011 dengan capaian kinerja mencapai 100%. Sampai dengan tahun 2012 persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas mencapai 42,33%.

## **10. Komunikasi dan Informatika**

Jumlah Desa yang dapat akses jaringan informasi pada tahun 2012 sebanyak 354 Desa dari target 354 Desa sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Persentase cakupan ketersediaan media distribusi informasi pada tahun 2012 yaitu 47,43% dari target 47,43% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 sebesar 47,43%. Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi pada tahun 2012 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi sehingga capaiannya 100%. Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi pada tahun 2012 sebesar 66,66% dari target 66,66%. Dibandingkan dengan tahun 2011 ada peningkatan sebesar 49,99%.

## **11. Koperasi, Usaha Kecil dan menengah**

Bidang koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. Di Kabupaten Cianjur, pada tahun 2014 jumlah Koperasi aktif sebanyak 440 koperasi dari 1417 koperasi. Jumlah KUMKM pada tahun 2014 sebanyak 67.000 dengan jumlah usaha mikro sebanyak 42.000, usaha kecil sebanyak 24.900 dan usaha menengah sebanyak 100.

Program yang dilaksanakan antara lain: program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, program pengembangan usaha dan peningkatan manajemen koperasi dan UKM, program peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan kelembagaan KUMKM, program perkuatan permodalan koperasi dan UKM, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi mikro kecil dan menengah, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, program membangun jiwa, semangat dan citra KUMKM, dan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah.

## **12. Penanaman Modal**

Jumlah peningkatan angka investasi tahun 2012 mengalami penurunan 18,64% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 81,36%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 71,64%.

Rata-rata lama proses perijinan pada tahun 2012 tidak ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 0%. Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha pada tahun 2012 mengalami peningkatan 100% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 20%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 200% dengan demikian, capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya.

## **13. Kepemudaan dan Olah Raga**

Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS. Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS pada tahun 2012 ada 5 kelompok dari target 5 kelompok sehingga capaian kinerjanya 100%.

#### **14. Statistik**

Penyusunan Profil daerah sangat diperlukan dalam upaya mengembangkan segala potensi yang dimiliki daerah sehingga arah pengembangannya akan disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki daerah tersebut.

Penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 diterbitkan dalam rangka memberikan gambaran tentang kondisi, potensi, dan perkembangan sektoral hasil - hasil pembangunan yang telah dicapai serta dapat menambah perbendaharaan data sebagai bahan untuk perencanaan maupun evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Kebutuhan akan sistem informasi yang mampu menyediakan informasi secara cepat menjadi sangat penting dewasa ini. Saat ini pemerintah dituntut untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan akurat dan mendukung *interoperabilitas* dan interaksi aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

Seiring perkembangan teknologi IT khususnya internet yang sangat pesat, maka diperlukan peningkatan dan pengembangan terhadap website [bappeda.cianjurkab.go.id](http://bappeda.cianjurkab.go.id) baik dari sisi desain, kemudahan akses, keamanan dan kemudahan pengelolaan serta update data. Dimana saat ini beberapa data harus diupdate secara manual, sehingga beresiko untuk terjadinya kesalahan.

Pengembangan database berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang terkoneksi dengan internet (Webgis) merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk dalam perencanaan pembangunan. Selain sebagai pendukung pengambilan keputusan dalam kegiatan perencanaan dan untuk diseminasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, geodatabase Kabupaten Cianjur juga dibangun dalam rangka penerapan Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dimana untuk mengimplementasikan UU KIP, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menyiaokan daftar informasi yang dapat diakses publik, seperti informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, maupun informasi yang wajib disediakan setiap saat, sesuai amanat UU KIP tersebut.

#### **15. Kebudayaan**

Benda, situs dan kawasan cagar budaya Kabupaten Cianjur yang dilestarikan pada tahun 2013 masih belum bertambah dari tahun 2012 yaitu 20 buah termasuk dalam kriteria SEDANG.

#### **16. Perpustakaan**

Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan dapat dilihat dari adanya kendaraan perpustakaan keliling yang pada tahun 2013 terdapat 2 unit kendaraan, adanya perpustakaan desa yang terdapat pada 74 desa yang langsung dikelola oleh pemerintah desa, adanya perpustakaan pada mesjid besar kecamatan yang terdapat di 20 kecamatan, terdapat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 17.396 buku, serta bertambahnya jumlah pengunjung yang meningkat dari tahun 2012 sebanyak 10.441 orang sedangkan pada tahun 2013 menjadi 27.073 orang.

## **C. Fokus Layanan Urusan Pilihan**

### **1. Kearsipan**

Pengelolaan arsip secara baku yang dilaksanakan oleh OPD pada tahun 2012 yang telah menerapkan ada 80 OPD dan pada tahun 2013 mengalami penambahan jumlah OPD sebanyak 2 OPD sehingga total OPD yang menerapkan pengelolaan arsip menjadi 82 OPD. Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip pada tahun 2012 baru ada 50 unit dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu menjadi 150 unit. Jumlah pengelola arsip yang ada pada tahun 2012 sebanyak 10 orang dan pada tahun 2013 mengalami penambahan jumlah pengelola menjadi 32 orang.

### **2. Kelautan dan perikanan**

Posisi sector perikanan dan kelautan mempunyai potensi yang besar karena posisi Kabupaten Cianjur bagian selatan mempunyai sumber daya kelautan dan bagian utara sebagai sentra perikanan darat dengan adanya bendungan cirata. Produksi perikanan budidaya kabupaten Cianjur tahun 2013 mencapai 91.197 ton sedangkan besaran produksi perikanan laut belum dioptimalkan karena kendala teknologi dan sarana prasarana kelautan yang ada.

### **3. Pariwisata**

Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Kawasan Wisata Cibodas, Cikundul, Jangari dan Jayanti. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dari 460.394 orang pada tahun 2012 menjadi 1.061.424 orang pada tahun 2013. Peningkatan jumlah wisatawan yang cukup tinggi merupakan akumulasi dari data yang diperoleh dari jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur maupun yang mengunjungi kawasan wisata yang dikelola oleh pihak swasta. Sedangkan data tahun 2012 tersebut hanya diperoleh dari kawasan wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur saja.

### **4. Pertanian**

Sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam PDRB Kab. Cianjur dan salah satu sentra produksi pangan utama (terutama padi) di Jawa Barat. Seiring terjadinya pergeseran aktivitas perekonomian dan alih fungsi lahan, dominasi sector pertanian cenderung mengalami penurunan. Namun dilihat dari sisi produksi, Sejauh ini nilai produksi komoditi pertanian dari tahun 2012 ke tahun 2013 terus mengalami peningkatan.

Nilai produksi padi sebagai salah satu komoditi pangan utama mengalami peningkatan dari 903.546 ton di tahun 2012 menjadi 925.966 ton di tahun 2013. Seiring dengan peningkatan produksi, nilai produktifitas per luas lahan untuk komoditi padi atau bahan pangan utama lainnya juga dapat ditingkatkan. Pada tahun 2012 produktifitasnya sebesar 56,35 kuintal/ha meningkat menjadi 61,76 kuintal/ha pada tahun 2013.

Adapun di sub sektor perkebunan, nilai produksi komoditi perkebunan mengalami peningkatan dari 35.355 ton di tahun 2012 menjadi 40.277,62 ton di tahun 2013. Demikian pula, nilai produksi komoditi di sub sector peternakan juga mengalami peningkatan. Komoditi daging meningkat dari 37.898,04 ton di tahun 2012 menjadi 37.987,17 di tahun 2013 sedangkan produksi komoditi perikanan meningkat pula.

## 5. Kehutanan

Di sektor kehutanan, ada dua persoalan yang menjadi isu utama yang perlu ditangani meliputi lahan kritis dan kawasan lindung di luar kawasan hutan. Lahan kritis di Kabupaten Cianjur cukup luas sehingga mengancam kelestarian lingkungan terutama kawasan hutan yang harus dilestarikan. Selama tahun 2012-2013, luas lahan kritis yang telah ditangani sebanyak 3.973 Ha. Dengan besarnya lahan kritis yang telah ditangani, diharapkan akan mengurangi lahan kritis yang ada di Kabupaten Cianjur. Adapun kawasan lindung di luar kawasan hutan terus diupayakan untuk meningkat untuk mendukung kelestarian lingkungan dan mendukung cakupan kawasan lindung yang harus disediakan sebesar 50% dari luas total wilayah Kabupaten Cianjur. Kawasan lindung di luar kawasan hutan sampai dengan tahun 2013 sebesar 15,53% atau meningkat sebesar 0,01% dari tahun sebelumnya (15,52%). Cakupannya masih rendah karena adanya desakan pembangunan yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan penduduk

## 6. Energi dan Sumber Daya Mineral

Penyediaan Tenaga Listrik dikuasai oleh Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pelaksanaan oleh Pemerintah dan Pemda dilakukan oleh BUMN (PLN) dan BUMD. BUMN (PLN) diberi prioritas pertama, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Swadaya Masyarakat dapat berpartisipasi. Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, diberi kesempatan kepada BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi BUMN (PLN) untuk menyediakan tenaga listrik.

Di Kabupaten Cianjur Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik mengalami peningkatan dari 55,75% pada tahun 2012 menjadi 55,80% di tahun 2013, namun belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 55,72% dapat direalisasikan 55,80% dengan capaian kinerja 96,67% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 91,90%.

Selain sumberdaya alam berupa keindahan alam, Kabupaten Cianjur juga memiliki sumberdaya mineral bahan logam dan non logam yang dapat ditambang. Untuk bahan logam yang terdiri dari Bijih Emas, Pasir Besi, Timah Hitam dan Seng tersebar di Kecamatan Campaka, Tanggeung, Naringgul, Kadupandak, Sindangbarang, Cidaun, Agrabinta dan Campaka. Sedang untuk bahan tambang yang non-logam yang terdiri dari diatomea, galena, lempung, pasir, trass, pasir dan batu, andesit, batu gamping, bentonit, oker, granit, felsfard, kaolin, batu setengah permata, batu templek, dan batu terkersikan tersebar secara seporadis di kecamatan Bojongpicung, Mande, Cibeber, Campaka, Karang Tengah, Cibinong, Tanggeung, Pagelaran, Cidaun, Cugenang, Cianjur, Warungkondang, Cilaku, Pacet, Sukanagara, Tanggeung, Cikalongkulon, Agrabinta. *(Sumber : Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur Tahun 2013)*

Namun dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya mineral bahan logam dan non logam, masih ditemui kegiatan penambangan yang tanpa izin dan sulit dikendalikan. Sektor pertambangan ini juga memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten Cianjur.

## **7. Perdagangan**

Sektor perdagangan dan industri belum menjadi sektor utama dalam PDRB Kabupaten Cianjur, tetapi dari tahun ke tahun kontribusi sektor perdagangan dan industri menunjukkan peningkatan. Keberadaan pasar rakyat merupakan pendukung perdagangan di Kabupaten Cianjur. Sampai dengan tahun 2014, jumlah pasar rakyat adalah sebanyak 15 buah. Pada tahun 2014, jumlah pasar rakyat yang mendapat fasilitas sarana dan prasarana sebanyak 10 buah. Selain itu, dilakukan revitalisasi pasar rakyat Warungkondang dengan dana Bantuan Provinsi dan dilakukan pendataan ulang jumlah pedagang dan PKL di pasar induk dan pasar Bojongmeron. Terfasilitasinya pasar rakyat diharapkan dapat meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang.

## **8. Perindustrian**

Cakupan bina kelompok industri pada tahun 2014 meningkat. Pada tahun 2012, jumlah IKM adalah sebanyak 1.249 IKM, dan pada tahun 2014 sebanyak 1.265 IKM. Terdapat pertumbuhan sebesar 1.28% dari tahun 2012 ke tahun 2014. Jumlah IKM terbanyak di kecamatan Cianjur, Karangtengah dan Warungkondang. Pembinaan kelompok IKM dilaksanakan melalui antara lain penerapan teknologi tepat guna. Dengan dilakukannya pembinaan kelompok IKM diharapkan dapat mengefisienkan pekerjaan, meningkatkan daya jual produk dan daya saing produk sehingga dapat meningkatkan pendapatan IKM.

## **9. Transmigrasi**

Pelaksanaan transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur termasuk transmigrasi umum dengan jumlah peserta transmigran yang sudah ditempatkan pada tahun 2012 sebanyak 35 KK atau 126 jiwa dengan daerah yang menjadi lokasi tujuan adalah Provinsi Kalimantan Barat berlokasi di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 11 KK (44 jiwa) dan Kabupaten Ketapang sebanyak 10 KK (39 jiwa), dan untuk Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas sebanyak 14 KK (43 jiwa). Sedangkan pada tahun 2013 penempatan para transmigran meningkat menjadi 44 KK atau 166 jiwa dengan daerah yang menjadi lokasi tujuan adalah Provinsi Kalimantan Barat berlokasi di Kabupaten Ketapang sebanyak 5 KK (18 jiwa) dan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 14 KK (57 jiwa), Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Timur sebanyak 10 KK (34 jiwa) dan di Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 15 KK (57 jiwa).

### **2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah dalam menyusun rancangan awal RPJPD provinsi, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota disusun menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota masing-masing. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

## A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

### o **Pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)**

Komposisi pengeluaran konsumsi non pangan dan pangan dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu wilayah selain PDRB per kapita. Di bawah ini tabel persentase konsumsi Rumah Tangga tahun 2006-2011.

**Tabel 2.10**  
**Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan**  
**Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Cianjur**  
**Tahun 2006 s.d 2011**

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pengeluaran untuk Pangan (%)	59,55	63,5	58,48	60,94	61,33	<b>62,59</b>
2.	Pengeluaran non Pangan (%)	40,45	36,5	41,52	39,06	38,67	<b>37,41</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Indikator Inkesra tahun 2012

Dari tabel di atas terlihat adanya fluktuasi persentase pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non pangan. Komposisi pengeluaran terbesar penduduk Cianjur masih untuk pangan dan terlihat juga kecenderungan pengeluaran untuk non pangan semakin menurun. Persentase pengeluaran non pangan yang semakin tinggi menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk secara umum belum mengalami peningkatan.

Apabila dikaitkan dengan peningkatan PDRB per kapita, ternyata tidak memberikan manfaat yang merata bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Cianjur. Hal tersebut juga berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat Cianjur yang cukup terbatas. Berdasarkan tabel di bawah ini terlihat bahwa beberapa kecamatan di Kabupaten Cianjur masih memiliki daya beli di bawah rata-rata Kabupaten.

Tabel. 2.11

## Daya Beli Per Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2011

Kecamatan	PPP	Kecamatan	PPP
1. AGRABINTA	613,37)	1. <b>CIBEBER</b>	617,28
	*		)*
2. LELES	<b>561,75)</b>	2. <b>WARUNGKONDANG</b>	643,46
	*		
3. SINDANGBARANG	613,61)	3. <b>GEKBRONG</b>	648,54
	*		
4. CIDAUN	615,88)	4. <b>CILAKU</b>	617,88
	*		
5. NARINGGUL	<b>589,42)</b>	5. <b>SUKALUYU</b>	647,91
	*		
6. CIBINONG	<b>582,96)</b>	6. <b>BOJONGPICUNG</b>	621,28
	*		
7. CIKADU	<b>558,83)</b>	7. <b>HAURWANGI</b>	642,65
	*		
8. TANGGEUNG	<b>589,26)</b>	8. <b>CIRANJANG</b>	651,09
	*		
9. PASIRKUDA	<b>576,08)</b>	9. <b>MANDE</b>	624,14
	*		
10. KADUPANDAK	<b>552,85)</b>	10. <b>KARANGTENGAH</b>	624
	*		
11. CIJATI	<b>560,19)</b>	11. <b>CIANJUR</b>	661,15
	*		
12. TAKOKAK	<b>584,08)</b>	12. <b>CUGENANG</b>	849,44
	*		
13. SUKANAGARA	<b>599,43)</b>	13. <b>PACET</b>	632,17
	*		
14. PAGELARAN	<b>593,14)</b>	14. <b>CIPANAS</b>	645,65
	*		
15. CAMPAKA	<b>590,32)</b>	15. <b>SUKARESMI</b>	637,85
	*		
16. CAMPAKAMULYA	614,78)	16. <b>CIKALONGKULON</b>	605,42
	*		)*
KABUPATEN CIANJUR	<b>616,98</b>		

\*) Di Bawah rata-rata Kabupaten

Tabel di atas memperlihatkan bahwa beberapa kecamatan di Kabupaten Cianjur masih memiliki daya beli di bawah rata-rata Kabupaten. Kecamatan yang memiliki daya beli di bawah rata-rata umumnya berada di Wilayah Pembangunan Tengah dan Selatan. Di Wilayah Pembangunan Utara hanya Kecamatan Cikalongkulon yang masih di bawah rata-rata Kabupaten Cianjur. Masih terjadinya ketimpangan pendapatan yang mencolok antara penduduk wilayah Tengah-Selatan dengan Utara menunjukkan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan belum mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah.

o **Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Seperti halnya inflasi, analisis NTP dilakukan terbatas dalam lingkup regional (provinsi) dan gabungan (nasional).

**Tabel 2.12**

**Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2008 s.d 2013 Provinsi Jawa Barat**

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013)*
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	108,97	119,17	129,77	144,18	156,01	<b>173,11</b>
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	112,72	122,58	130,67	137,42	143,20	<b>157,31</b>
3.	<b>Rasio</b>	<b>96,14</b>	<b>97,21</b>	<b>99,29</b>	<b>104,90</b>	<b>108,93</b>	<b>110,04</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

)\* : NTP sampai dengan bulan November 2013

Dari tabel di atas, terlihat bahwa NTP Provinsi Jawa Barat menunjukkan kenaikan selama kurun waktu 5 tahun. Hingga bulan November 2013, NTP Provinsi Jawa Barat telah mencapai 110,04. Kenaikan NTP tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan petani di Jawa Barat.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

### **2.2.1 Evaluasi RPJMD**

Evaluasi RPJMD Kabupaten Cianjur saat ini masih menggunakan data hasil evaluasi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang setiap tahunnya disusun dan menjadi bahan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Cianjur. Evaluasi RPJMD dikaitkan dengan visi dan misi jangka menengah yang diturunkan kepada sasaran-sasaran pembangunan yang harus dicapai setiap tahunnya.

#### **A. Evaluasi Misi Pertama Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan yang Bermutu**

Dalam misi pertama ini terdapat 11 sasaran pembangunan yang hendak dicapai. Pada umumnya sasaran yang hendak dicapai menunjukkan kinerja yang baik walaupun sebagian besar masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Pencapaian sasaran tersebut ditunjukkan oleh masing-masing indikator.

Sasaran pembangunan yang berkinerja baik dan mencapai target yang telah ditentukan dan bahkan melampaui target adalah meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan, meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan dan tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik. Sasaran pembangunan yang menunjukkan kinerja yang baik namun belum memenuhi target adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan

pendidikan, terkendalinya angka mengulang dan *drop out* di setiap tingkatan dan jenjang, meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan. Adapun sasaran yang masih menunjukkan kinerja yang sedang dan kurang adalah upaya meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam layanan pendidikan, upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas pendidikan tinggi lokal, serta peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan.

#### **B. Evaluasi Misi Kedua Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu**

Dalam Rangka Pencapaian Misi Kedua, terdapat 13 sasaran pembangunan di misi tersebut yang hendak dicapai. Pada umumnya sasaran yang hendak dicapai menunjukkan kinerja yang baik walaupun sebagian besar masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Pencapaian sasaran tersebut ditunjukkan oleh masing-masing indikator. Pada sasaran meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan di indikator persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan kinerja yang dicapai masih kurang baik. Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius bagi sektor yang membidangi infrastruktur jalan sehingga mempermudah masyarakat akses ke lokasi pelayanan kesehatan.

Dari semua sasaran yang ada, sasaran pembangunan yang berkinerja baik dan mencapai target yang telah ditentukan dan bahkan melampaui target adalah Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam keluarga dan masyarakat; Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan; Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat; Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat; Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat; Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu; Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas; Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR); Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan; Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak; Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas; Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan; dan Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak.

#### **C. Evaluasi Misi Ketiga Meningkatkan Daya Beli Masyarakat**

Terdapat dua bidang lingkup perencanaan terkait dengan misi ketiga yaitu perencanaan pembangunan perekonomian dan infrastruktur dan lingkungan hidup. Dalam rangka pencapaian misi tiga meningkatkan daya beli masyarakat lingkup perencanaan pembangunan ekonomi terdapat 9 sasaran pembangunan di misi tersebut yang hendak dicapai. Pada umumnya pencapaian sasaran yang hendak dicapai menunjukkan kinerja yang baik baik dan telah mencapai target yang telah ditentukan. Pencapaian sasaran tersebut ditunjukkan oleh masing-masing indikator.

Dari sasaran-sasaran tersebut yang telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan adalah berkembangnya agribisnis

yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing, berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan, meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar dan meningkatkan promosi dan kerjasama investasi. Sasaran-sasaran yang kinerjanya cukup baik tapi belum mencapai target berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Sementara untuk sasaran terwujudnya iklim investasi yang sehat kinerjanya masih kurang dan belum memenuhi target sasaran.

Sedangkan dalam lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, ada 12 sasaran pembangunan di misi ketiga yang hendak dicapai. Khusus untuk Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, terdapat 6 sasaran yang ingin dicapai dalam misi tersebut, pada umumnya sasaran yang hendak dicapai menunjukkan kinerja yang baik walaupun terdapat beberapa yang belum memenuhi target yang ditetapkan.

Dari kesemua sasaran yang ada, sasaran pembangunan yang mencapai kinerja baik adalah berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing. Dari kesemua sasaran yang ada, sasaran pembangunan yang mencapai kinerja sedang adalah terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dari kesemua sasaran yang ada, sasaran pembangunan yang tercapai kinerja kurang adalah menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur.

#### **D. Evaluasi Misi Keempat Memantapkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Misi 4 yang berkaitan dengan memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi selama 3 tahun mulai dari tahun 2011, 2012 dan 2013 secara keseluruhan dapat dikatakan baik walaupun ada beberapa program yang masih belum dapat memenuhi target RPJMD. Kinerja pada misi 4 ini terdiri dari 5 sasaran, dimana setiap sasaran memiliki indikator dan di dalamnya terdapat program yang dimaksudkan untuk mendukung tercapainya misi. Program yang terdapat di dalam misi ini dilaksanakan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam pelaksanaan kegiatannya harus ada kerjasama baik berupa koordinasi maupun informasi secara lintas sektor.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, reformasi birokrasi ini dilaksanakan pada setiap lini baik dalam kelembagaan, penyusunan kebijakannya, keuangannya (pendapatan asli daerah dan belanja baik belanja langsung maupun tidak langsung), laporan pertanggung jawaban, penegakan perda, penyusunan dokumen perencanaan daerah, penataan ruang, kepegawaiannya, kependudukan, kearsipan, Sertifikasi asset (tanah), permasalahan sosial, jaringan, sistem dan akses informasi, selain ini terdapat dalam pemerintahan desa yang berkaitan dengan penyusunan

profil desa, pemanfaatan teknologi tepat guna dan perkembangan lembaga ekonomi perdesaan. Hal-hal tersebut termasuk ke dalam unsur yang akan dievaluasi dalam kinerja dari misi ini dikatakan baik, cukup maupun kurang.

Kinerja misi 4 yang dianggap cukup berkaitan dengan kepegawaian yaitu mengenai pelaksanaan diklat kepemimpinan bagi para pejabat struktural, kependudukan dalam hal kepemilikan KTP serta kearsipan mengenai prasarana pengelolaan asset. Sedangkan untuk kinerja dengan penilaian kurang berkaitan dengan penyusunan kebijakan tentang pertanian dan agribisnis, ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan peternakan, tata ruang dan pengelolaan lingkungan, ketenagakerjaan, sosial, penyusunan SOP serta ketersediaan media distribusi informasi, bagi unsur yang lain dikatakan baik.

#### **E. Evaluasi Misi Kelima Aktualisasi Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara**

Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang di maksud membantu mengubah kekuatan energi dalam tujuan menjadi kekuatan yang lebih besar yang dapat di capai melalui organisasi, usaha, maupun keterampilan. Nilai-nilai spiritual mengekspresikan iman kita, ketulusan, kesabaran, ketekunan, niat baik dan penyerahan diri pada Tuhan.

Dari Tujuan sasaran dan indikator target pada misi 5 (lima) untuk menumbuh kembangkan kebiasaan melakukan sifat baik/mulia yang melekat pada diri manusia sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari hari, melalui pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksana kebijakan, melalui komitmen pemerintah daerah untuk membangun masyarakat yang berakhlakul karimah. Agar terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi masalah sosial, dari pemahaman nilai-nilai akhlakul karimah yang di terapkan pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur menjadi target menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD, menurunnya jumlah pelanggaran perda, Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada dari keseluruhan indikator target merupakan koordinasi internalisasi nilai nilai akhlakul karimah sebagai pedoman pada kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Perwujudannya melalui aparat yang taat hukum, ketersediaan kebijakan internalisasi, terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggaran dan kondisi trantibum), untuk lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial lingkungannya adalah pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

#### **2.2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan**

RKPD merupakan operasionalisasi dari RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2011-2016 sehingga perencanaan tahunan tidak dapat lepas dari perencanaan pembangunan jangka menengah. Capaian kinerja selalu dikaitkan dan diakumulasikan dengan capaian lima tahunan. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD

tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai.

Hasil evaluasi pelaksanaan tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

## **A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Pendidikan**

Evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan di sektor pendidikan diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.**

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan mencapai 93,59% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8 indikator yang telah ditetapkan terdapat 6 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 2 indikator melebihi target, 6 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan namun 4 diantaranya termasuk ke dalam kriteria BAIK.

#### **b. Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan.**

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Seluruh capaian indikator kinerja pada sasaran ini adalah 100%.

#### **c. Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang.**

Rata-rata capaian sasaran terkendalinya angka mengulang dan *drop out* di setiap tingkatan dan jenjang mencapai 97,14% termasuk dalam kriteria BAIK.

Dari 5 indikator yang telah ditetapkan, seluruh indikator termasuk dalam kriteria BAIK, namun capaian kelima indikator tersebut belum memenuhi target.

#### **d. Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan Rata-rata.**

Capaian sasaran meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK, dari 3 indikator yang telah ditetapkan seluruhnya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dan termasuk dalam kriteria BAIK.

#### **e. Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja.**

Capaian kinerja sasaran meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerjamencapai 58,33% termasuk dalam kriteria SEDANG dan belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

- f. Tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam peserta didik.

Capaian kinerja sasaran tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam peserta didik mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

- g. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan mencapai 98,02% termasuk dalam kriteria BAIK, namun belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

- h. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana mencapai 0% termasuk dalam kriteria KURANG dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

- i. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

- j. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

- k. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan 137,05% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator kinerja yang telah ditetapkan, 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator lainnya dalam kriteria SEDANG. Selanjutnya terdapat 2 indikator melebihi target, 2 indikator memenuhi target dan 1 indikator tidak memenuhi target.

## **2. Kesehatan**

Dalam RPJMD bidang kesehatan telah ditetapkan 9 sasaran strategis. Dalam penilaian Lakip 2013 pada umumnya mendapat kriteria baik meskipun masih ada yang berkriteria kurang sehubungan capaian indikatornya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis yang masih perlu mendapatkan perlakuan khusus guna mencapai target indikator yang telah ditetapkan adalah : Terwujudnya masyarakat proaktif memelihara & meningkatkan derajat kesehatan, partisipasi aktif menolong dirinya serta membudayakan PHBS dalam keluarga dan masyarakat.

## **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Program-program yang memenuhi target yang telah ditetapkan adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Program peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, Program

pengembangan perumahan, Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, program penyediaan dan pengelolaan air baku, program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, Program penanggulangan pasca bencana.

Selain itu, terdapat beberapa Program yang tidak memenuhi target yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Program Pemberdayaan jasa Konstruksi, program rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan, program rehab/pemeliharaan trotoar dan program rehab/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong.

Terdapat juga Program yang melampau target yaitu Program penanggulangan pasca bencana bidang infrastruktur, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (untuk indikator tingkat kapasitas daya dukung jalan desa), Program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan trotoar.

Program yang memenuhi target yang ditetapkan adalah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, sedangkan Program yang tidak memenuhi target Program Perencanaan Tata Ruang dan Program yang melampau target Program Pemanfaatan Ruang.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Program yang tidak memenuhi target adalah Program lingkungan sehat perumahan, program pengelolaan areal pemakaman, dan program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

### **B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **1. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan mencapai 43,18% termasuk dalam kriteria KURANG. 3 indikator yang telah ditetapkan termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya, 2 indikator melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak mencapai 121,53% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja ketiga indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penilaian di atas, dimasa datang, seiring dengan meningkatnya pembangunan yang diikuti dengan semakin terbukanya lapangan pekerjaan baru di satu sisi namun disisi lain menuntut adanya kualitas pendidikan serta ketrampilan yang lebih tinggi. Kondisi ini menuntut perlunya akselerasi kualitas pendidikan dan ketrampilan kaum perempuan secara utuh agar tidak tersisihkan dalam persaingan tenaga kerja.

#### **2. Pangan**

Dari hasil evaluasi Renja tahun 2014. Program Peningkatan Ketahanan Pangan realisasi tingkat capaian target tercapai 100%

### **3. Lingkungan Hidup**

Berdasarkan laporan triwulanan evaluasi Renja OPD Tahun 2014 dapat disampaikan bahwa untuk aspek pelayanan umum bidang lingkungan hidup evaluasinya adalah sebagai berikut:

#### **A. Dinas PSDAP**

1. Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, evaluasinya belum memenuhi target.

#### **B. Dinas Kebersihan dan Pertamanan**

1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) (belum terevaluasi).

#### **C. BLHD**

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (belum terevaluasi).

### **4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- *Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.*

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat mencapai 116,78% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 43 indikator yang telah ditetapkan 32 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP, 9 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 14 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 17 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 12 indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

- *Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif.*

Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif mencapai 175,00% termasuk dalam kriteria BAIK, namun hanya 1 indikator yang telah melebihi target yang telah ditetapkan.

### **5. Perhubungan**

Berdasarkan laporan triwulanan Evaluasi Renja Tahun 2014 dapat diketahui bahwa capaian target sebagai berikut:

**Tabel 2.13**

**Capaian Target di Bidang Perhubungan**

No	Indikator Kinerja	Target tahun 2014 (%)	Realisasi capaian target pada tahun 2014 (%)	Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
1	Cakupan ketersediaan prasarana perhubungan (%)	40,52	19	65,52
2	Cakupan ketersediaan fasilitas perhubungan (%)	69,3	66	83
3	Efektivitas pelayanan angkutan (%)	89,4	88	96,67
4	Upaya perwujudan ketertiban lalu lintas (%)	80	78	100
5	Upaya kelaikan keselamatan kendaraan (%)	91,6	90	100
6	Cakupan keandalan prasarana dan fasilitas perhubungan (%)	53,56	46	61,46

Dari tabel di atas, terlihat bahwa target pertama yaitu cakupan ketersediaan prasarana perhubungan pada tahun 2014 sebesar 40,52% baru tercapai 19%, sedangkan kondisi kinerja pada akhir RPJMD sebesar 65,52%. Masih jauhnya realisasi dengan capaian target kinerja disebabkan antara lain kurangnya anggaran untuk program dan kegiatan untuk mencapai target tersebut.

Target kedua yaitu cakupan ketersediaan fasilitas perhubungan pada tahun 2014 tercapai 66%, sedangkan target pada tahun 2014 sebesar 69,3%. Diharapkan pada tahun 2016 dapat tercapai target kinerja sebesar 83%.

Target ketiga yaitu efektivitas pelayanan angkutan pada tahun 2014 tercapai 88% dari target tahun 2014 89,4%. Diharapkan pada tahun 2016 dapat tercapai target kinerja sebesar 96,67%. Target keempat yaitu upaya perwujudan ketertiban lalu lintas. Pada tahun 2014 sudah tercapai 78% dari target kinerja 80%. Diharapkan pada tahun 2016 dapat tercapai kinerja sebesar 100%. Target kelima yaitu upaya kelaikan keselamatan lalu lintas. Pada tahun 2014 tercapai target 90% dari target kinerja pada tahun 2014 91,6%. Diharapkan pada tahun 2016 dapat tercapai target kinerja 100%. Target keenam yaitu cakupan keandalan prasarana dan fasilitas perhubungan. Pada tahun 2014 tercapai target 46% sedangkan target tahun 2014 adalah 53,56%. Diharapkan pada tahun 2016 dapat tercapai target 61,46%.

## 6. Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian urusan pemerintahan antara

pemerintah pusat, provinsi dan daerah di sektor perhubungan. Adapun yang menjadi wewenang daerah kabupaten/kota di bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.14**

**Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Komunikasi dan Informatika**

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Aplikasi informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan laporan triwulanan evaluasi Renja Tahun 2014 dapat diketahui bahwa capaian target sebagai berikut:

**Tabel 2.15**

**Capaian Target Bidang Komunikasi dan Informatika**

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2014 (%)	Realisasi Capaian Target pada Tahun 2014 (%)	Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
1	Cakupan ketersediaan media distribusi informasi	90	83%	100
2	Pengkajian dan pembangunan sub domain website daerah (%)	41		100
3	Cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi (%)	66,7	67%	100
4	Upaya sinergitas distribusi informasi	67,33	83%	100

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian target pertama yaitu cakupan ketersediaan media distribusi informasi pada tahun 2014 yaitu sebesar 83%. Realisasi ini lebih kecil dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90%. Selanjutnya, indikator kinerja cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi tercapai sebesar 67%. Realisasi capaian target ini sesuai dengan target indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator kinerja terakhir yaitu upaya sinergitas distribusi informasi. Pada tahun 2014 tercapai 83% melampaui target tahun 2014 yaitu sebesar 67,33%.

## **7. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Persentase koperasi aktif pada tahun 2012 mengalami peningkatan 0,83% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 101,07%. Pada dasarnya jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir, namun seiring dengan bertambahnya jumlah koperasi sehingga persentase koperasi akhir mengalami fluktuatif. Adapun capaian kinerja terdapat target akhir tahun 2016 yaitu 77%.

Jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM dan jumlah BPR/LKM aktif mengalami 25% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terdapat target akhir tahun 2016 56%. Jumlah BPR/LKM Aktif 2012 mengalami peningkatan 22% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 58%. Capaian kinerja persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2012 yaitu 100% dengan peningkatanm besar 0,99% Dari tahun 2011. Adapun jumlah usaha Mikro dan kecil pada tahun 2012 sebanyak 66,910 orang.

## **8. Penanaman Modal**

Jumlah peningkatan angka investasi tahun 2012 mengalami penurunan 18,64% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 81,36%.Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 41,64%.

Rata-rata lama proses perijinan pada tahun 2012 tidak ada peningkatan dibandingkan pada tahun 2011 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun apaan kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 0%.jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha pada tahun 2012 mengalami peningkatan 100% dari tahun 2011 dengan capaian kinerja 20%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 200% dengan demikian, capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya.

## **9. Kebudayaan**

Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dan Program Pengembangan Nilai Budaya realisasi tingkat capaian target tercapai 100%. Program kegiatan urusan kebudayaan yang telah mencapai target untuk tahun 2013 adalah program pengelolaan kekayaan budaya melalui kegiatan-kegiatan pasanggiri mamaos, maenpo, dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Program pengelolaan keragaman budaya

melalui kegiatan kemilau nusantara, eksibisi seni budaya dan festival Jayanti.

### **C. Urusan Pilihan**

#### **1. Perikanan dan Kelautan**

Evaluasi terhadap tingkat pencapaian kinerja dan anggaran sampai dengan pelaksanaan Renja OPD tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan kinerjanya karena kurang dari 50% kinerjanya dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD tahun 2011-2016. Program tersebut meliputi:

- a. Program pengembangan budidaya perikanan
- b. Program pengembangan perikanan tangkap
- c. Program pengembangan perikanan dan kelautan

#### **2. Pariwisata**

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya realisasi tingkat capaian 100%

#### **3. Pertanian**

Evaluasi terhadap tingkat pencapaian kinerja dan anggaran sampai dengan pelaksanaan Renja OPD tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD tahun 2011-2016, yaitu meliputi:

- a. Program peningkatan kesejahteraan petani
- b. Program peningkatan ketahanan pangan
- c. Program Pengembangan Peningkatan pemasaran hasil produk pertanian
- d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
- e. Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- f. Program Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan
- g. Program pengembangan agribisnis
- h. Program Pengembangan Usaha Perkebunan Rakyat
- i. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

#### **4. Kehutanan**

Evaluasi terhadap tingkat pencapaian kinerja dan anggaran sampai dengan pelaksanaan Renja OPD tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan kinerjanya karena kurang dari 50% dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD tahun 2011-2016. Program tersebut meliputi:

- Program rehabilitasi hutan dan lahan

#### **5. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Berdasarkan laporan triwulanan evaluasi Renja OPD Tahun 2014 dapat disampaikan bahwa untuk aspek pelayanan umum bidang Energi dan Sumberdaya Mineral evaluasinya adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan dan pengembangan bidang tenaga listrikan/energi dengan kegiatan utama perencanaan dan pembangunan listrik perdesaan dari target kinerja sebesar 56,92 % realisasinya tercapai.

- b. Program pengembangan data dan informasi pertambangan dan energi, belum tervaluasi.

## **6. Perdagangan**

Pada tahun 2013 urusan perdagangan melaksanakan program-program yaitu perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan dan pengembangan ekspor, peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yang rata-rata pencapaian pada kegiatan-kegiatannya dapat memenuhi target.

## **7. Perindustrian**

Urusan industri melaksanakan program pengembangan industri kecil dan menengah serta program pengembangan kapasitas IPTEK system produksi. Program pengembangan industri kecil dan menengah baru dapat mencapai 80% dari target yang ditentukan dengan tidak tercapainya target dari kegiatan peningkatan kualitas produk IKM dan design kemasan. Program peningkatan kapasitas IPTEK system produksi melalui kegiatan penerapan teknologi tepat guna dapat mencapai target kegiatan.

### **2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Hasil evaluasi terhadap pencapaian target RPJMD dan hasil pembahasan yang melibatkan *stakeholders* terkait, pada OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Cianjur, telah dirumuskan beberapa permasalahan terkait pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD, dengan rincian permasalahan per misi adalah sebagai berikut:

##### **A. Permasalahan Misi Pertama Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan yang Bermutu**

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD, permasalahan yang muncul berkenaan dengan pencapaian misi pertama "meningkatkan ketersediaan dan jangkauan layanan pendidikan yang bermutu" yaitu meliputi:

1. Rata-rata daya tampung sekolah dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama untuk sekolah SD, SMP, dan SMA masih belum memadai berdasarkan standar yang diinginkan.
2. Masih kurang meratanya kualitas pendidikan di tiap jenjang pendidikan.
3. Masih tingginya angka putus sekolah di tingkat SMP dan SMA/SMK yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan serta masih tingginya biaya sekolah terutama untuk pendidikan menengah.
4. Masih rendahnya penyerapan tamatan sekolah kejuruan untuk diterima di dunia usaha.
5. Masih kurangnya kesadaran kesetaraan gender dalam penyediaan layanan pendidikan.
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang peduli dalam antisipasi penanggulangan bencana.

7. Masih rendahnya kualitas pendidikan tinggi lokal dan belum ada perguruan tinggi negeri di Cianjur.
8. Kesadaran budaya baca dari masyarakat yang masih kurang.

#### **B. Permasalahan Misi Kedua Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu**

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD, permasalahan yang muncul berkenaan dengan pencapaian pada misi kedua, yaitu:

1. Perilaku masyarakat yang kurang memelihara lingkungan ditandai sebagian masyarakat belum memiliki jamban sehat;
2. Akses mendapatkan air minum yang berkualitas masih kurang;
3. Puskesmas dan jaringannya belum berfungsi maksimal, karena akses terhadap layanan kesehatan yang sulit terjangkau;
4. SDM kesehatan masih relatif kurang; Kesadaran Masyarakat terutama ibu hamil dan bayi masih kurang untuk berkunjung ke sarana kesehatan puskesmas maupun posyandu;
5. Perlu adanya kesinambungan dengan industri rumah tangga yang akan mendapatkan izin PIRT;
6. Peningkatan pengawasan makanan atau hasil produksi Rumah Tangga;
7. Tingkat pemerataan dan distribusi obat ke sarana kesehatan perlu ditingkatkan;
8. Keterlambatan dalam pembayaran klaim biaya Jamkesmas/Jamkesda/Jampersal;
9. Masih adanya berkas yang tidak lengkap sehingga menyulitkan klaim ke Pusat; Rendahnya Intensitas KIE kontrasepsi Jangka Panjang (MJP) oleh Petugas;
10. Terbatasnya ketersediaan alat kontrasepsi bagi Keluarga Pra KS dan KS I Alasan Ekonomi; Terbatasnya Pusat Rujukan, Informasi dan Konsultasi Bagi Pemenuhan Kebutuhan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi;
11. Kurangnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak serta Peran Perempuan dalam Berbagai Bidang Kehidupan. Ratio Kekurangan Petugas PLKB dibandingkan dengan Wilayah Garapan (Desa/Kelurahan) adalah 4:1.

#### **C. Permasalahan Misi Ketiga Meningkatkan Daya Beli Masyarakat**

Berdasarkan evaluasi kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD, permasalahan yang muncul berkenaan dengan pencapaian misi di lingkup bidang perencanaan pembangunan ekonomi meliputi:

1. Masih lemahnya akses KUMKM terhadap permodalan, informasi usaha, dan kemitraan, sulitnya pengurusan perizinan usaha bagi KUMKM dan masih kurangnya regulasi yang mendukung KUMKM menghambat berkembangnya KUMKM di Kabupaten Cianjur.
2. Masih kurang berkembangnya destinasi wisata dan *event-event* budaya.

3. Masih kurangnya dukungan data tentang pelaku usaha IKM, eksportir dan data periodik ekspor impor.
4. Masih banyaknya jaringan irigasi yang rusak mencapai 40% dan perlunya pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah baik.
5. Masih belum adanya penanganan yang serius terhadap padi pandanwangi yang menjadi komoditas unggulan dan khas Cianjur.

Sedangkan dalam lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, terdapat beberapa permasalahan meliputi:

1. Permasalahan kelembagaan jalan dengan belum lengkapnya database penanganan jalan.
2. Belum selesainya RTR dan raperda RDTR belum selesai padahal paling lambat 2 tahun setelah RTRW ditetapkan.
3. RTH masih perlu koordinasi lintas OPD.
4. Belum dapat menurunkan jumlah sampel secara signifikan. Perlu ditindaklanjuti rencana pembuatan TPA Cikalongkulon, Ciluku karena TPA Pasirsembung sudah melebihi kapasitas. Saat ini baru peningkatan mengenai pengelolaan sampah ke masyarakat.
5. Saat ini masih menertibkan penambang-penambang yang belum berijin dan belum dapat mengawasi lokasi-lokasi yang tidak boleh ditambang.
6. Tidak tersedianya data akurat tentang lahan kritis dan sulitnya mendata dan melestarikan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan mata air.

#### **D. Permasalahan Misi Keempat Memantapkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Berdasarkan evaluasi kinerja pada misi 4 berdasarkan sasaran pembangunan dalam RPJMD, terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait pencapaian misi "memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi", yaitu sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan KTP serta berkaitan dengan belum selesainya proses perekaman, perbaikan dan pencetakan KTP elektronik.
2. Belum diselesaikannya penyusunan kebijakan tentang pertanian dan agribisnis, ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan peternakan, tata ruang dan pengelolaan lingkungan, ketenagakerjaan, sosial, penyusunan SOP.

#### **E. Permasalahan Misi Kelima Aktualisasi Nilai-nilai Akhlakul Karimah Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara**

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD, permasalahan yang muncul berkenaan dengan pencapaian misi kelima, meliputi:

1. Masih adanya angka perceraian pada lingkungan PNS.
2. Masih ditemukannya warga masyarakat cianjur yang melanggar perda.

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat cianjur dalam pemilu, pemilukada.
4. Rasio jumlah petugas linmas dibandingkan dengan jumlah penduduk belum mencukupi.
5. Masih adanya warga yang menyandang masalah kesejahteraan sosial.

### **2.3.2. Permasalahan Pembangunan Dalam Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan**

#### **A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

- a. Belum meratanya fasilitas pendidikan;
- b. Masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan banyak masyarakat usia didik tidak melanjutkan pendidikannya karena mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga sehingga capaian APK dan APM rendah.
- c. Rendahnya kemampuan ekonomi juga menyebabkan angka putus sekolah masih tinggi;
- d. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, rendahnya partisipasi pendidikan umumnya disebabkan karena relatif besarnya kebutuhan biaya pendidikan;
- e. Kurang adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan;
- f. Masih terbatasnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan;
- g. Masih kurangnya tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata;
- h. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten;
- i. Belum adanya pemetaan bangunan fasilitas pendidikan yang kondisinya rusak ringan/berat, sehingga pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehabilitasi gedung sekolah belum didasarkan pada kebutuhan dan prioritas;
- j. Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan bangunan sekolah;
- k. Masih terbatasnya ketersediaan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas;
- l. Masih kurang adanya partisipasi masyarakat karena rendahnya pemahaman tentang pendidikan anak usia dini (PAUD)

##### **2. Kesehatan**

Dari hasil penelaahan dan kajian yang telah dilakukan ada beberapa masalah yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, adapun masalah tersebut antara lain adalah:

- a. Kerjasama dan kordinasi lintas sektor dalam penerapan program belum optimal.
- b. Masih kurangnya sumberdaya dan sarana prasarana kesehatan terutama untuk daerah-daerah yang cukup jauh.
- c. Pendistribusian tenaga medis tidak merata dan tidak sesuai dengan kopetensi yang di miliki.
- d. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahtraan masyarakat sehingga pengetahuan serta kepedulian terhadap kepedulian kurang, terutama di pedesaan.
- e. Sarana dan prasarana pendukung (jalan, komunikasi dan transportasi) masih kurang sehingga untuk daerah-daerah yang jauh sulit untuk menjangkau fasilitas kesehatan.
- f. Kurangnya informasi mengenai kesehatan (wilayah pedesaan)
- g. Masih adanya persepsi keliru dari sebagian tokoh masyarakat (TOMA) dan tokoh agama (TOGA) terhadap pemerintah yang dapat mempengaruhi masyarakat terhadap program-program kesehatan yang sudah ada.
- h. Input data yang tidak akurat dari masyarakat terutama yang berkaitan dengan calon penerima bantuan.

## **B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Pangan**

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD, permasalahan yang muncul berkenaan dengan pencapaian misi ke 3 Meningkatkan daya beli masyarakat yaitu meliputi:

- a. Jumlah alokasi dana distribusi raskin belum optimal dikarenakan daya beli masyarakat masih rendah
- b. Percepatan Penganekargaman konsumsi pangan belum optimal

### **2. Lingkungan Hidup**

Secara umum hal-hal yang menyebabkan target-target capaian di aspek pelayan umum urusan lingkungan hidup tidak tercapai dikarenakan masih adanya permasalahan-permasalahan yang klasik diantaranya:

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih perlu dikoordinasikan antar lintas OPD

- b. Kondisi TPA yang sudah kadaluarsa umur pakainya. Perlu ditindaklanjuti rencana pembuatan TPA baru,
- c. Saat ini masih menertibkan penambang-penambang yang belum berijin dan belum dapat mengawasi lokasi-lokasi yang tidak boleh ditambang.
- d. Adanya kesadaran dan meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya dokumen Lingkungan Hidup.

### **3. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain:

- a. Masih kurangnya kepedulian masyarakat atas kepemilikan KTP menyebabkan masih belum terpenuhinya capaian rasio penduduk berKTP per satuan penduduk;
- b. Masyarakat kurang peduli pentingnya akte kelahiran menyebabkan masih belum terpenuhinya rasio bayi berakte kelahiran dan belum terpenuhinya pencapaian Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk;
- c. Kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap akte nikah menyebabkan masih belum terpenuhinya rasio pasangan berakte nikah;
- d. Penentuan data kependudukan masih kurang jelas karena banyaknya sumber data kependudukan yang tidak sama menyebabkan belum tercapainya ketersediaan database kependudukan skala provinsi;
- e. Masih adanya keterlambatan pengadaan kertas KTP dan masih lemahnya kapasitas SDM masih menyebabkan belum terselenggaranya penerapan KTP Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

### **4. Perhubungan**

Permasalahan pembangunan daerah di bidang perhubungan di Kabupaten Cianjur, antara lain:

- a. Kurangnya anggaran di sektor perhubungan sehingga beberapa rencana target kinerja tidak terpenuhi,
- b. Jumlah angkutan umum perkotaan melebihi kebutuhan,
- c. Tidak terlayannya beberapa ruas jalan oleh angkutan umum,
- d. Tidak stabilnya harga BBM yang menyebabkan tarif angkutan umum perlu penyesuaian,
- e. Kurang optimalnya penggunaan terminal Rawabango,
- f. Belum terwujudnya pembangunan terminal tipe C di ibu kota kecamatan.

### **5. Komunikasi dan Informatika**

Secara umum beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah bahwa terdapat kegiatan dalam program yang tidak dilaksanakan karena terbatas waktu

pelaksanaan, terbatas pagu anggaran. Selain itu, domain website kabupaten Cianjur belum mencakup semua OPD. Baru beberapa OPD yang mempunyai sub domain.

## **6. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Masyarakat selaku pelaku pasar harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibeli. Adanya isu negatif terhadap produk dapat menurunkan jumlah penjualan dari produk IKM. Pembinaan mengenai cara produksi yang benar sangat penting dilakukan terhadap IKM.

## **7. Kebudayaan**

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD, permasalahan yang muncul meliputi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan festival seni dan budaya, dan kegiatan promosi yang tidak optimal,
- b. Kekurangan partisipasi masyarakat dalam rangka pelestarian benda, situ dan cagar budaya,
- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang kebudayaan.

## **C. Urusan Pilihan**

### **1. Perikanan dan Kelautan**

Produksi perikanan budidaya menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai sentra produksi ikan yang potensial namun terkendala dengan terbatasnya pengembangan lahan perikanan yang selama didominasi oleh pengembangan perikanan di Waduk Cirata. Untuk itu perlu adanya upaya ekstensifikasi lahan untuk budidaya perikanan dan meningkatkan pemberdayaan terhadap kelompok tani yang bergerak disektor perikanan. Sedangkan untuk perikanan tangkap, potensi yang ada belum dikembangkan karena terkendala oleh sarana dan prasarana serta teknologi yang terbatas.

### **2. Pariwisata**

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pariwisata adalah Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang pariwisata, Kurang optimalnya pengembangan kualitas produk wisata, Kurang optimalnya kegiatan *Road Show* dan pameran pariwisata Cianjur, Belum adanya *event* pariwisata tingkat Nasional, Semakin berkembangnya kepariwisataan Kabupaten bogor di daerah puncak Terutama dengan tumbuhnya daya tarik wisata yang semakin menguatkan peluang kepariwisataan kabupaten bogor dan berdampak pada semakin mengecilnya peluang dari Kabupaten Cianjur jika tidak segera direvitalisasi, belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata, belum tersedianya kebijakan dalam pembangunan pariwisata yang bersipat meningkat dan menjadi dasar bagi seluruh *stakeholders* di dalam menjalankan pembangunan di sektor pariwisata dan belum adanya wadah komunikasi terpadu di dalam mengembangkan kepariwisataan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

### **3. Pertanian**

Walaupun secara umum produksi komoditi pangan tercapai, tantangan kedepan dalam upaya menjaga dan meningkatkan kapasitas produksi hasil-hasil pertanian semakin besar. Identifikasi terhadap beberapa permasalahan yang muncul diantaranya:

- a. Lahan abadi untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkurang akibat dari maraknya alih fungsi lahan.
- b. Ketersediaan infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian dan irigasi pertanian masih kurang memadai dimana diantaranya 40% dari jaringan irigasi yang ada mengalami kerusakan.
- c. *Early warning system* dalam pengelolaan pertanian belum memadai dimana teknologi dan sarana pengendalian hama dan penyakit belum mencukupi.

### **4. Kehutanan**

Upaya rehabilitasi lahan kritis terus dilakukan namun pencapaiannya masih rendah dibandingkan dengan target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan sumber daya lahan yang ada sehingga menyebabkan meningkatnya lahan kritis baru karena aktifitas penduduk. Untuk itu upaya rehabilitasi lahan kritis perlu disertai dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya alam yang ada.

### **5. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ditetapkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang kelautan, kehutanan, serta energi dan sumberdaya mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

### **6. Perdagangan**

Tercapainya beberapa indikator kinerja menggambarkan kinerja sektor perdagangan terhadap pembangunan di Kabupaten Cianjur, tidak terlepas dari Munculnya minimarket modern secara tidak langsung dapat menjadi pesaing pedagang yang berlokasi di pasar rakyat, selain itu adanya PKL yang tidak berlokasi sesuai tempatnya dapat mengganggu ketertiban umum. Penataan pasar rakyat sangat penting dilakukan agar pedagang di pasar rakyat dapat meningkatkan kesejahteraannya.

### **7. Perindustrian**

Tercapainya beberapa indikator kinerja menggambarkan kinerja sektor perindustrian terhadap pembangunan di Kabupaten Cianjur, tidak terlepas dari kurangnya dukungan anggaran terhadap sektor perindustrian, kurangnya waktu untuk menyelesaikan program dan kurangnya sumber daya.

**BAB III**  
**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN**  
**KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

**3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cianjur tahun 2016 tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi makro yang telah ditetapkan oleh pusat maupun provinsi dan kondisi perekonomian sebelumnya dan perkiraan tahun 2015.

**3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015**

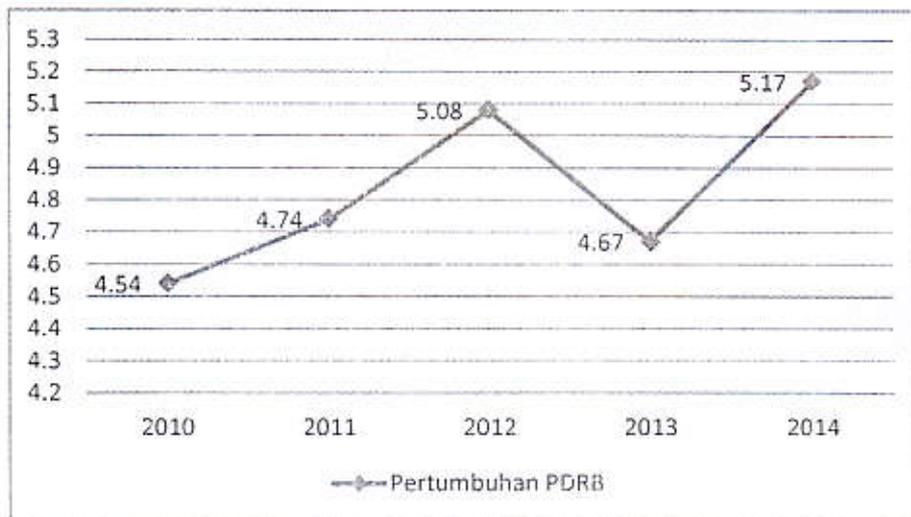
Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator makro ekonomi diantaranya perkembangan nilai PDRB kabupaten Cianjur, Laju pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB per kapita, struktur PDRB, kemiskinan dan jumlah investasi.

**Tabel. 3.1**  
**Indikator Ekonomi Tahun 2010 sd. 2014**

Indikator Ekonomi	2010	2011	2012	2013	2014	Sumber
PDRB (Rp Juta)						BPS
a. Berlaku	18.435.749,66	20.573.046,71	22.267.596,59	24.893.206,21	28.068.776,24	BPS
b. Konstan	8.299.833,70	8.693.509	9.134.765,41	9.561.319,14	10.055.716,83	BPS
Pertumbuhan PDRB (%)	4,54	4,74	5,08	4,67	5,17	BPS
Investasi (Rp. Milyar)	525 ,00	881,75	976	1.149,00	1.079	BP2TPM
PDRB per kapita (Rp)	8.434.274	9.390.766	10.027.345	11.109.536	12.514,717*	Bappeda
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.171.281	2.210.267	2.231.107	2.250.305	2.235.418	BPS
Indeks Gini			0,329			BPS
Tingkat Kemiskinan (%)	14,32	13,82	13,17	12,02	11,25*	Bappeda

Keterangan : \* angka Prediksi Bappeda, 2015.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Seiring peningkatan nilai tambah produksi dilihat dari nilai PDRB, trend pertumbuhan PDRB juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sampai tahun 2014 pertumbuhan ekonomi berada pada nilai kisaran pertumbuhan sebesar 4,84 %, dan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi telah menyentuh pertumbuhan di atas 5 % yaitu sebesar 5,17%. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut juga ditunjang oleh peningkatan nilai investasi dari tahun 2010-2014. Investasi dari sumber domestik maupun dari luar Cianjur dapat meningkatkan akumulasi modal dan produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Trend pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut dan optimisme terhadap iklim investasi yang ada diharapkan dapat mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi yang diperkirakan akan tumbuh di atas 5 digit dan nilai investasi diperkirakan sebesar Rp. 1,3 trilyun di tahun berjalan 2015.



**Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Cianjur Tahun 2010-2014**

Seiring dengan tumbuhnya perekonomian daerah, upaya sebaliknya diharapkan dapat menekan pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk kabupaten Cianjur rendah yaitu sebesar 0,73% dan jumlah penduduk pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 2.235.418 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk yang rendah dapat mendorong peningkatan pendapatan (PDRB) per kapita. Analisa kaitan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan PDRB per kapita menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang rendah selama ini telah mendorong peningkatan laju pertumbuhan pendapatan per kapita. Adanya peningkatan PDRB per kapita ini setiap tahunnya ditunjang pula rendahnya nilai **Indeks Gini** kabupaten Cianjur, yaitu sebesar 0,329 pada tahun 2012 sehingga termasuk kedalam kategori ketimpangan pendapatan masyarakat yang rendah. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang meningkat telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Trend pertumbuhan PDRB per kapita ini diharapkan dapat meningkat seiring dengan optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun 2015.

Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cianjur setiap tahunnya mengalami penurunan, yang ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin yang semakin kecil terhadap jumlah penduduk total yang ada. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan Kabupaten Cianjur yaitu sebesar 12,02% dan diharapkan semakin menurun di tahun 2014 dan 2015 seiring dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi.

### **3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016**

Walaupun dibayangi oleh laju pertumbuhan ekonomi dunia yang masih lemah dan tidak stabil, namun laju pertumbuhan ekonomi Indonesia optimis meningkat. Seiring dengan optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur pada tahun 2016 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi. Untuk itu, Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur di tahun 2014 sebesar 5,17% dapat dijaga dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Laju pertumbuhan ini tentunya didukung oleh peningkatan laju pertumbuhan sektor tersier (jasa dan perdagangan) dengan ditandainya munculnya industri baru dan potensi wisata yang selama ini dimiliki terutama di kawasan puncak dan sekitarnya. Selain itu, posisi strategis yang dimiliki kabupaten Cianjur karena berada dekat di antara dua kutub pertumbuhan maka menjadi kawasan strategis untuk aktifitas ekonomi dan mendorong tingkat investasi dari luar daerah.

Sumber daya alam yang besar menjadi potensi ekonomi yang cukup baik, namun pengelolaannya perlu ditingkatkan sehingga dapat berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Adanya CAFTA yang diberlakukan mulai tahun 2015, juga memberi peluang bagi arus investasi, tenaga kerja dan pasar sehingga perlu dimanfaatkan sebaik mungkin

Hal yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi adalah kurang memadainya ketersediaan infrastruktur ekonomi yang ada, perubahan iklim global yang sulit diprediksi, harga BBM fluktuatif, dan kestabilan politik daerah. Infrastruktur jalan yang vital baru mencapai jalan mantap sebesar 35,56% sehingga dinilai masih rendah untuk mendukung bagi mobilitas penduduk dan barang. Adanya iklim yang berubah mempengaruhi aktifitas perekonomian terutama pertanian yang menjadi salah satu sektor dominan di perekonomian Kabupaten Cianjur. Demikian pula Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diperkirakan tidak stabil bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti harga BBM dunia, walaupun pada tahun 2014 terdapat penurunan harga sehingga dapat berakibat meningkatkan laju inflasi yang memacu kenaikan harga-harga barang dan jasa. Terakhir, adanya Pilkada pada akhir tahun 2015 dapat menurunkan tingkat keamanan investasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga perlu adanya upaya untuk menjaga situasi yang aman di masyarakat.

Di sisi pembangunan sumber daya manusia (SDM), kualitas SDM yang ada dinilai masih rendah terlihat dari rata-rata lama sekolah yang telah diselesaikan penduduk usia 15 tahun ke atas di kabupaten cianjur yang baru mencapai 6,8 tahun yang berarti pada umumnya penduduk Kabupaten Cianjur rata-rata baru tamat SD. Hal ini berimplikasi kepada kurangnya kesiapan SDM yang ada untuk bersaing dan turut serta dalam pembangunan di segala sektor. Selain itu, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran Kabupaten Cianjur selain menjadi beban sosial, juga menjadi beban ekonomi.

Sering dengan optimisme daerah terhadap prospek dan tantangan yang kemungkinan terjadi di tahun 2016, beberapa indikator ekonomi diprediksi akan mengalami peningkatan sebagaimana dirangkum dalam table di bawah ini.

**Tabel. 3.2**

**Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2016**

<b>Indikator</b>	<b>2016</b>
PDRB (Rp. Juta)	
• Berlaku	34.467.237,55
• Konstan	11.155.158,63
Laju Petumbuhan Ekonomi (%)	<b>5,0-5,5</b>
Angka Kemiskinan (%)	<b>11,3 -12,3</b>
Investasi (Rp. Milyar)	<b>1.306</b>

*Sumber: Analisa Bappeda, 2015.*

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan yang akan ditempuh pemerintah Kabupaten Cianjur berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam kurun waktu 2011-2014 terus mengalami peningkatan, rata-rata tiap tahunnya meningkat sebesar 13,39. Pada tahun 2014 Pos Pendapatan meningkat sebesar 14,82% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2013 atau berada di atas rata-rata. Seiring meningkatnya pendapatan daerah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan, rata-rata meningkat sebesar 38,16%. Pada tahun 2014 PAD meningkat sebesar 44,73% dibanding tahun 2013.

Peningkatan PAD ini menjadi dasar untuk melihat kemampuan dan kemandirian keuangan daerah. Setiap tahunnya kemampuan keuangan daerah selalu meningkat, namun namun nilainya masih relatif rendah. Pada tahun 2014, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseluruhan pendapatan daerah baru mencapai 14,92%. Di sisi lain, kemandirian keuangan daerah juga terus mengalami peningkatan walaupun masih rendah. Seiring dengan makin meningkatnya besaran PAD, maka ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari luar juga makin berkurang.

Proyeksi pendapatan pada tahun 2016 ditentukan berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan daerah secara garis besar tersusun atas komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. APBD tahun 2011-2015 dapat dijadikan analisa untuk memproyeksikan pendapatan tahun 2016. Proyeksi pendapatan tahun 2016 menunjukkan bahwa pendapatan daerah di tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 2.728.610.896.879 yang diasumsikan sama dengan pendapatan APBD murni 2015.

Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan dan penggunaannya, arah kebijakan pendapatan daerah diupayakan dengan meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui:

- ✓ Meningkatkan efektifitas pengelolaan APBD dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah
- ✓ Meningkatkan pendapatan asli yang bersumber dari pajak dan retribusi
- ✓ Mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru
- ✓ Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial

Gambaran selengkap perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3  
Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 dan Proyeksi Tahun 2016

Uraian	Realisasi APBD 2011	Realisasi APBD 2012	Realisasi APBD 2013	APBD Perubahan 2014	APBD Murni 2015	Proyeksi 2016
<b>pendapatan Asli Daerah</b>	<b>147.346.021.050</b>	<b>215.802.558.713</b>	<b>266.100.616.612</b>	<b>385.119.931.062</b>	<b>408.821.527.521,08</b>	<b>408.821.527.521</b>
hasil Pajak Daerah	46.061.730.290	58.244.642.590	72.705.571.590	112.592.392.373	122.592.997.106,00	122.592.997.106
hasil Restribusi Daerah	18.634.410.128	20.741.977.845	20.751.790.357	22.560.432.455	25.391.324.884,00	25.391.324.884
hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.863.644.197	6.371.177.684	7.105.630.560	8.248.748.956	8.248.748.956,00	8.248.748.956
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	75.786.236.435	130.444.760.594	165.537.624.105	241.718.357.278	252.588.456.575,08	252.588.456.575
<b>dana Perimbangan</b>	<b>1.171.748.477.370</b>	<b>1.430.477.371.436</b>	<b>1.522.548.238.940</b>	<b>1.593.572.999.043</b>	<b>1.636.859.480.918,00</b>	<b>1.636.859.480.918</b>
bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Alokasi Umum	106.190.018.370	113.219.508.436	119.417.581.940	87.309.491.043	96.155.668.918,00	96.155.668.918
Alokasi Khusus	965.472.959.000	1.168.372.143.000	975.134.000.000	1.407.469.628.000	1.443.963.022.000,00	1.443.963.022.000
lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	100.085.500.000	148.885.720.000	97.513.400.000	98.793.880.000	96.780.790.000,00	96.780.790.000
pendapatan Hibah provinsi	452.178.835.026	389.250.931.165	459.210.392.793	6.022.020.656.778	682.929.888.440,05	682.929.888.440
dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi	6.499.965.000	95.470.000	-	5.260.289.200	-	-
dana penyesuaian dan otonomi Khusus	52.635.528.456	77.174.177.555	91.041.302.666	154.965.444.578	152.442.578.440,05	152.442.578.440
antuan Keuangan dari pemerintah Daerah lainnya	316.907.351.540	221.006.291.000	298.168.442.500	354.291.523.000	459.339.426.000,00	459.339.426.000
pendapatan lainnya	76.135.990.030	90.974.992.610	71.222.762.285	87.685.400.000	-	-
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.771.273.333.446</b>	<b>2.035.530.861.314</b>	<b>2.247.859.248.345</b>	<b>2.580.895.586.883</b>	<b>2.728.610.896.879,13</b>	<b>2.657.463.012.879</b>

Keterangan : \* RAPBD setelah evaluasi

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja daerah yang tidak dipengaruhi oleh adanya program/kegiatan pembangunan sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi oleh adanya program/kegiatan pembangunan. Besar kecilnya belanja langsung dalam struktur belanja daerah sangat mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja program pembangunan.

Seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka kemampuan alokasi belanja daerah juga meningkat. Rata-rata peningkatan setiap tahunnya adalah sebesar 15,70% dengan pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2014 sebesar 27,03% (diatas rata-rata). Belanja langsung pada tahun 2014 mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya. *Share* belanja tersebut terhadap belanja total daerah meningkat menjadi 39,51%. Hal ini menunjukkan makin besarnya kapasitas fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah walaupun masih di bawah 50% . Pada komponen belanja langsung, belanja modal diupayakan terus ditingkatkan untuk memperbesar aset-aset hasil pembangunan yang pemanfaatannya dapat dirasakan langsung kepada masyarakat.

Karena adanya keterbatasan kemampuan belanja daerah, arah kebijakan belanja daerah tahun 2016 harus ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja dalam rangka memenuhi pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang telah ditentukan. Hasil proyeksi belanja daerah menunjukkan bahwa kemampuan pendanaan pembangunan daerah melalui pos belanja langsung daerah sebesar Rp. 747.783.995.102,-, untuk berbagai program kegiatan baik yang akan ditentukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten sendiri. Gambaran APBD Kabupaten Cianjur dapat dilihat dalam table di bawah ini. Adapun kebijakan belanja daerah yang harus ditempuh diantaranya:

- ✓ Efektifitas dan efisiensi belanja daerah
- ✓ Meningkatkan alokasi belanja untuk peningkatan belanja modal daerah
- ✓ Alokasi belanja pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama untuk mempercepat pencapaian target dan hasilnya dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah tersusun atas komponen penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya, pinjaman, pencairan dana cadangan dan lain-lain, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi), pembayaran pokok utang dan lain-lain. Perkembangan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4

## Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2011-2015 dan Rencana Tahun 2016

Uraian	Realisasi APBD 2011	Realisasi APBD 2012	Realisasi APBD 2013	APBD Perubahan 2014	APBD Murni 2015	Proyeksi 2016
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.119.347.278.097,00</b>	<b>1.284.563.887.531,00</b>	<b>1.435.217.869.779,00</b>	<b>1.653.648.575.066,69</b>	<b>1.911.878.999.696,13</b>	<b>1.909.679.017.777,3</b>
Belanja Pegawai	930.089.560.302,00	1.041.449.220.005,00	1.122.777.894.886,00	1.334.012.390.543,20	1.535.080.528.655,38	1.535.080.528.655,38
Belanja Subsidi (DAU)	4.286.033.600,00	4.093.641.375,00	213.585.173.500,00	-	-	-
Belanja Hibah DAU/DBH/DBH. v/SILPA)	57.696.435.395,00	156.268.854.224,00	23.015.853.500,00	184.049.580.000,00	90.064.220.000,00	90.064.220.000,00
Belanja Bantuan Sosial DAU/B.P/SILPA)	42.163.687.314,00	18.573.175.000,00	26.494.409,00	10.497.700.000,00	3.713.700.000,00	3.713.700.000,00
Belanja Bantuan Bantuan kepada Desa/Kabupaten/Kota dan Pemertintahan Desa (DBH)	697.189.436,00	695.555.789,00	73.350.666.984,00	117.747.159.788,00	276.230.316.705,00	276.230.316.705,00
Belanja Hasil Kerja/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa DAU/SILPA)	78.546.520.000,00	60.054.187.814,00	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	5.867.852.050,00	3.429.253.324,00	2.361.786.500,00	5.141.762.816,49	4.590.252.416,75	4.590.252.416,75
<b>Belanja Langsung</b>	<b>658.257.469.875,05</b>	<b>688.617.098.596,88</b>	<b>716.900.863.577,14</b>	<b>1.080.166.746.565,33</b>	<b>905.432.676.073,00</b>	<b>747.783.995.102</b>
Belanja Pegawai	64.216.951,00	56.464.732.569,00	61.511.670.614,00	60.062.987.314,36	51.656.244.940,00	-
Belanja Barang Dan Jasa	371.530.765.020,05	309.511.649.331,88	345.487.670.261,14	520.212.115.920,62	487.936.291.459,00	-
Belanja Modal	222.509.753.340,00	322.640.716.696,00	309.901.421.702,00	499.891.643.330,35	365.840.139.638,00	-
Belanja Lain-lain	1.777.604.747.972,05	1.973.180.986.127,88	2.152.118.733.356,14	-	-	-

Keterangan : \* RAPBD setelah evaluasi

Tabel 3.5  
Pembiayaan Daerah Tahun 2008-2015

No.	Uraian	Realisasi APBD 2011	Realisasi APBD 2012	Realisasi APBD 2013	APBD Perubahan 2014	APBD Murni 2015
1	Penerimaan pembiayaan Daerah	-	101.880.869.997,24	152.943.247.712,36	213.432.435.050,42	103.700.778.890,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	-	101.880.869.997,24	152.943.247.712,36	213.432.435.050,42	103.700.778.890,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	13.179.542.915,00	11.287.497.471,00	46.187.653.568,00	60.512.700.301,00	15.000.000.000,00
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	6.500.000.000,00	15.500.000.000,00	23.000.000.000,00	15.000.000.000,00
2.2	Pembayaran Pokok Utang	11.179.542.915,00	4.787.497.471,00	30.687.653.568,00	37.512.700.301,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(13.179.542.915,00)</b>	<b>90.593.372.526,24</b>	<b>106.755.594.144,36</b>	<b>152.919.734.749,42</b>	<b>88.700.778.890,00</b>

**BAB IV**  
**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**4.1 Tujuan dan Sasaran**

Pembangunan daerah tahun 2016 merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, yang mengamanatkan pada pencapaian kinerja pembangunan untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Cianjur yaitu **“Cianjur Lebih Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”**. Adapun penjabaran visi tersebut dituangkan kedalam misi pembangunan yang meliputi :

1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu;
2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu;
3. Meningkatkan daya beli masyarakat;
4. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
5. Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Visi dan misi pembangunan tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu	1.1.Mewujudkan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat	1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan 2) Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan 3) Terkendalinya Angka Mengulang dan <i>Droup Out</i> di Setiap Tingkatan dan jenjang 4) Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan 5) Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			<p>6) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana</p> <p>7) Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal</p> <p>8) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan</p>
		1.2 Meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat	9) Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan
2	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu	2.1 Menyelenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis	<p>1) Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam keluarga dan masyarakat</p> <p>2) Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan</p> <p>3) Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat</p> <p>4) Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin</p> <p>5) Terjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat</p>

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			<p>6) Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi yang berkualitas</p> <p>7) Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)</p> <p>8) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan</p> <p>9) Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak</p>
3	Meningkatkan daya beli masyarakat	3.1 Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas usaha di berbagai sektor perekonomian	<p>1) Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing</p> <p>2) Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan</p> <p>3) Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan</p>

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			4) Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar
			5) Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna
			6) Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
			7) Terwujudnya iklim investasi yang sehat
			8) Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan
			9) Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur
			10) Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
			11) Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			12) Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
4	Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi	4.1 Mentransformasi budaya birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik ke seluruh unit kerja Pemerintah Kabupaten	<p>13) Terwujudnya dan terimplementasikan nya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawananan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berkhlah mulia</p> <p>14) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal</p> <p>15) Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat</p>

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			<p>16) Terwujudnya penegakan hukum, kepastian dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan kemananan yang kondusif</p> <p>17) terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi</p> <p>18) Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal</p>
5	Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	5.1 Mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai karakter pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	<p>19) Terwujudnya pemahanan yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah</p> <p>20) pelebagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p>
		5.2 Mengatasi permasalahan sosial pada kehidupan masyarakat dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat	21) terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial

## 4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur

Perkembangan nilai IPM Kabupaten Cianjur setiap tahun terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 IPM meningkat menjadi 70,38 dibandingkan tahun 2012 sebesar 70,02. Berdasarkan nilai komponen pembentukan IPM, nilai indeks pendidikan paling tinggi mencapai 80,64. Nilai indeks pendidikan diturunkan dari angka melek huruf sebesar 98,02 dan rata-rata lama sekolah 45,87. Di urutan berikutnya adalah indeks kesehatan sebesar 69,67 sedangkan nilai komponen terkecil yang terkecil adalah indeks daya beli sebesar 60,83. Indeks kesehatan diturunkan dari angka harapan hidup sebesar 69,67 sedangkan *purchasing power per capita* (PPP) sebesar 623,21. Komponen daya beli inilah yang perlu diakselerasi untuk mendongkrak pencapaian nilai IPM secara keseluruhan.

Pencapaian nilai IPM ini disesuaikan dengan target IPM yang telah ditetapkan dalam RPJMD dimana tahun 2016 target IPM adalah sebesar 71,00-72,00. Walaupun trend pencapaian IPM meningkat setiap tahunnya, akselerasi perlu terus dilakukan melalui program pembangunan yang fokus untuk mendongkrak pencapaian IPM tersebut. Dan berdasarkan RPJMD, target tahun 2015 adalah 70,50-71,50.

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Cianjur**

No	Komponen IPM	Realisasi IPM <sup>1</sup>					Proyeksi IPM Berdasarkan RPJMD		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016**
1	IPM	68,66	69,14	69,59	70,02	70,38	70,00-71,00	70,50-71,50	71,00-72,00
2	Indeks Kesehatan	67,74	68,33	68,92	69,50	69,67	70,59	71,11	71,67
3	Indeks Pendidikan	79,70	80,19	80,27	80,38	80,64	80,94	81,11	81,27
4	Indeks Daya Beli	58,53	58,89	59,38	60,18	60,83	61,23	61,75	62,27
5	Angka Harapan Hidup	67,74	68,33	68,92	69,50	69,67	67,07	67,25	67,07
6	Angka Melek Huruf	97,45	97,55	97,64	97,67	98,02	97,78	97,84	97,90
7	Rata-rata Lama Sekolah	44,21	45,48	45,48	45,80	45,87	7,20	7,36	7,19
8	PPP	613,26	614,83	617,59	620,40	623,21	624,93	627,20	631,42

Sumber : 1. Indikator Inkesra Kab. Cianjur Tahun 2014

\* Proyeksi dalam RKPD tahun 2014 dan 2015

\*\* Target IPM tahun 2016

#### **4.3 Prioritas Pembangunan**

##### **4.3 1. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016**

Rencana pembangunan nasional tahun 2016 merupakan tahapan kedua pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Adapun prioritas dan fokus pembangunan nasional tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) meliputi :
  1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
  2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
  4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
  9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
  
- Titik tekan pembangunan kabinet kerja adalah:
  1. Membangun untuk manusia dan masyarakat;
  2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan;
  3. Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dalam pembangunan;
  4. Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia;
  
- Fokus Pembangunan adalah:
  - Fokus 1 : Pembangunan sektor unggulan
    - 1) Kedaulatan Pangan
    - 2) Energi Ketenagalistrikan
    - 3) Kemaritiman
    - 4) Pariwisata
  
  - Fokus 2 : Pembangunan kebutuhan dasar
    - 1) Pendidikan
    - 2) Kesehatan
    - 3) Perumahan

### Fokus 3 : Pengurangan kesenjangan

- 1) Antar kelompok Pendapatan
- 2) Antar Wilayah

Adapun di tingkat Provinsi Jawa Barat, prioritas pembangunan Jawa Barat terdiri dari 10 prioritas sebagaimana terdapat dalam Dokumen RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018, meliputi:

1. CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (C5);
2. CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan (C5);
3. CG 3 : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku (C3), (C7);
4. CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian (7);
5. CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (6);
6. CG 6 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan (7);
7. CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan (8), (9);
8. CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (5);
9. CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Keamanan (1);
10. CG 10 : Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK (2), (3), (4).

#### **4.3 2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2016**

Penetapan prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Kabupaten Cianjur dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Cianjur sesuai dengan indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 dirumuskan berdasarkan isu strategis dan target indikator pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2016.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Penetapan isu strategis didasarkan pada situasi dan kondisi yang akan dihadapi pada Tahun 2015 dan 2016, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan Tahun 2013-2014. Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2013-2014 dan Target Indikator Pembangunan Tahun 2015-2016. Adapun isu strategis pembangunan tersebut meliputi:

1. Bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat:
  - 1). Aksebilitas dan mutu pendidikan, 2). Aksebilitas dan mutu kesehatan, 3). Pemerintahan yang baik, 4). Pemberdayaan masyarakat, 5). Penanggulangan kemiskinan, 6). Pengurusan gender, 7). Perlindungan perempuan dan anak, 8). Kependudukan, 9). Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah.

2. Bidang Ekonomi:

1). Ketahanan pangan, 2). Daya saing ekonomi daerah, 3). Pengembangan Kepariwisata, 4). Penataan perdagangan dan IKM, 5). Pelestarian budaya tradisional dan benda cagar budaya, 6). Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan. 7). Penguatan KUKM.

3. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup:

1). Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis, 2). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam, 3). Perwujudan penataan ruang Kabupaten Cianjur, 4). Peningkatan kerjasama penanganan kawasan perbatasan, 5). Penataan kawasan perkotaan dan ruang terbuka hijau, 6). Ketahanan energi dan kualitas air baku, 7). Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air.

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis dan kebijakan strategi pembangunan Kabupaten Cianjur, maka tema pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2016 adalah:

***“Memantapkan Capaian Kinerja Pembangunan menuju Kesejahteraan Masyarakat”***

Tema pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2016 tersebut mengarahkan pada perumusan prioritas pembangunan di berbagai bidang pada tahun 2016 yang akan menunjang pencapaian 9 (sembilan) prioritas.

Dengan arah kebijakan meliputi:

1. Memantapkan mutu pendidikan menuju pendidikan terstandarisasi, relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dan mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter;
2. Memperluas kesempatan pendidikan hingga pendidikan tinggi serta memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas riset perguruan tinggi lokal;
3. Memantapkan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersediaan obat & alat kesehatan esensial;
4. Memelihara, melindungi, dan meningkatkan derajat kesehatan serta status gizi terutama bagi penduduk miskin dan kelompok rentan;
5. Memantapkan promosi kesehatan dan mencegah penyakit;
6. Memantapkan aktivitas budi daya lahan, bersamaan dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung;
7. Memantapkan pelayanan prasarana dan fasilitas pendukung pengembangan wilayah;
8. Memantapkan kapasitas KUMKM;
9. Mewujudkan industri dan perdagangan daerah yang memiliki daya saing dan daya tahan;
10. Memantapkan pengelolaan penanganan masalah ketahanan pangan di daerah;
11. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, keefektifan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;

Tabel 4.4

## Prioritas dan Sasaran Pembangunan beserta Target dalam RKPD Tahun 2016

No.	Prioritas dan layanan pendidikan	Sasaran	Sasaran Pembangunan			OPD Utama	
			Sasaran	Indikator	Satuan		Target 2016
1	Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1 Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan	1) Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal maupun non formal	Rasio	1 : 91	DINAS PENDIDIKAN	
			2) Jumlah daya tampung pendidikan dini (ruang kelas)	Ruang Kelas	3267		
			3) Rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap penduduk usia sekolah SD dan SMP (7-15 tahun) baik formal maupun non formal	Rasio	1 : 288		
			4) Jumlah daya tampung SD/SMP	Ruang Kelas	437		
			5) Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal maupun non formal	Rasio	1 : 651		
			6) Jumlah daya tampung SMA/MA/SMK	Ruang Kelas	437		
			7) Persentase jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan	%	15,72		PU BINA MARGA
			8) Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV	%	100		DINAS PENDIDIKAN

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan			Target 2016	OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan		
	1.2 Meningkatkan angka kelulusan siswa seluruh jenjang pendidikan		1) Angka Kelulusan SD/MI	%	100	DINAS PENDIDIKAN
			2) Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	
			3) Angka SMA/MA/SMK Kelulusan	%	100	
	1.3 Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang		1) Persentase siswa yang naik kelas	%	100	DINAS PENDIDIKAN
			2) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	
			3) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	
			4) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK	%	0	
			5) Persentase siswa yang melanjutkan	%	100	
	1.4 Meningkatkan mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan		1) Siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI	%	100	DINAS PENDIDIKAN
			2) Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs	%	100	
			3) Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/SMK	%	100	
	1.5 Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik		1) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berkarakter	%	100	DINAS PENDIDIKAN

12. Mendorong masyarakat untuk mengembangkan kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki masalah sosial yang ada di sekitarnya berkaitan dengan penegakan supremasi hukum, serta perwujudan kerukunan hidup dalam masyarakat;
13. Memantapkan manajemen organisasi berorientasi aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dan memantapkan masyarakat yang mengaktualisasikan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.

Prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur tahun 2016 terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan;
2. Peningkatan Kualitas dan Layanan Kesehatan;
3. Penataan ruang;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
5. Peningkatan infrastruktur wilayah;
6. Peningkatan ketahanan pangan daerah;
7. Peningkatan perekonomian Daerah;
8. Peningkatan reformasi pemerintahan;
9. Peningkatan aktualisasi nilai-nilai akhlakul kariamah.

Dalam konteks proses *top down* dan *bottom up*, prioritas pembangunan telah memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan di atasnya baik provinsi maupun pusat serta memperhatikan hasil-hasil musyawarah perencanaan di tingkat kecamatan maupun desa. Jika disandingkan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional maupun provinsi terdapat kesesuaian sehingga prioritas pembangunan yang dilaksanakan selaras dan bersinergi dengan perencanaan di atasnya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Hubungan antara Prioritas Pembangunan**  
**Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Nasional**

No.	Prioritas Nasional (RPJMN 2014-2019)	Prioritas Provinsi (RPJMD Jawa Barat 2013-2018)	Prioritas Kabupaten Cianjur
1	<b>C1:</b> Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara	<b>CG 1 :</b> Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (C5)	<b>P1:</b> Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan (CG1) (C5)
2	<b>C2:</b> Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	<b>CG 2 :</b> Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(C5)	<b>P2:</b> Peningkatan Kualitas dan Layanan Kesehatan (CG2) (C5)
3	<b>C3:</b> Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan	<b>CG 3</b> Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( C3), (C7)	<b>P3:</b> Penataan ruang (CG 3, 6) (C 3,7)

No.	Prioritas Nasional (RPJMN 2014-2019)	Prioritas Provinsi (RPJMD Jawa Barat 2013-2018)	Prioritas Kabupaten Cianjur
4	<b>C4:</b> Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	<b>CG 4 :</b> Meningkatkan Ekonomi Pertanian (C7)	<b>P4:</b> Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana (CG 6) (C 7)
5	<b>C5:</b> Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	<b>CG 5 :</b> Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (C6)	<b>P5:</b> Peningkatan infrastruktur wilayah (CG 3) (C 3,7)
6	<b>C6:</b> Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	<b>CG 6 :</b> Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam, lingkungan hidup dan kebencanaan (C7)	<b>P6:</b> Peningkatan ketahanan pangan daerah (CG 4) (C 7)
7	<b>C7:</b> Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	<b>CG 7 :</b> Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan Olahraga (C8), (C9)	<b>P7:</b> Peningkatan perekonomian Daerah (CG 5,4) (C 6,7)
8	<b>C8:</b> Melakukan revolusi karakter bangsa	<b>CG 8 :</b> Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (C5)	<b>P8:</b> Peningkatan reformasi pemerintahan (CG 10) (C 2,3,4)
9	<b>C9:</b> Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	<b>CG 9 :</b> Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Keamanan (C1)	<b>P9:</b> Peningkatan aktualisasi nilai-nilai akhlakul kariamah (CG 1sd.10) (C 1)
10		<b>CG 10</b> Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan (C2),(C3), (C4)	

Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan kedalam sasaran pembangunan beserta target-target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun 2016, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
		1.6 Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa dalamantisipasi dan penanggulangan bencana	1) Jumlah sekolah yang terfasilitasi untuk meningkatkan pemahaman keterampilan dan kewaspadaan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	Sekolah	1	BPBD
		1.7 Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi lokal	2) Prosentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daerah	Buah	5	AKPER
		1.8 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan	3) Prosentase sekolah yang memiliki komite sekolah	%	100	DINAS PENDIDIKAN
		1.9 Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan	1) Perpustakaan Desa	Buah	50	ARPUSDA
			2) Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan	Buah	11	
			3) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksp	16.682	
			4) Pengunjung perpustakaan	Orang	13.006	

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
2	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	2.1 Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat	1) Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	57	TARKIM
			2) Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	100	
			3) Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	100	
		2.2 Meningkatkan kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan	1) Persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan	%	6,33	PU BM
			2) Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik	%	100	DINKES
			3) Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	Rasio	1 : 1.000.000	
			4) Kualitas sarana dan prasarana RSUD	%	100	RSUD CIANJUR
			5) Tersedianya Bangunan IGD Terpadu	%	100	RSUD CIMACAN
		2.3 Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat	1) Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	DINKES
			2) Prevalensi gizi buruk	%	0,9	

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
			3) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization	%	100	
		2.4 Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin	1) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	80	
			2) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Kunjungan	281.265	
		2.5 Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat	1) Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin	%	95	
		2.6 Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas	1) Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2,78	BKBPP
			2) Cakupan peserta KB aktif	%	67,20	
		2.7 Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)	1) Persentase pusat informasi dan konseling (PIK) remaja per kecamatan	%	78	
		2.8 Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	46	

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
		2.9 Meningkatkan kualitas tumbuh dan kelangsungan hidup anak	1) Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan	%	100	
		2.10 Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing	1) Nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun (ton) : - Padi 2) Nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun : produk perkebunan (ton) - produk perkebunan (ton) - produk htbk (ton)	TON Ton Ton	896,534 49.000 611,00	DISTAN DISHUTBUN
			3) Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya Pertanian	Kelompok	25	DISTAN
			4) Persentase sawah terairi	%	87,80	PSDAP
			5) Kondisi Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agribisnis	%	11,10	PU BM

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
		2.11 Meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan	1) Prosentase Skor Pola Harapan Pangan	%	64	BKPD
		2.12 Meningkatkan pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan	1) Jumlah obyek wisata dan meningkatkan sarana dan prasarana	Buah	4	DISBUDPAR
			2) Jumlah kunjungan wisata (orang)	Orang	4	
			3) Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	51	
			4) Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wileyah dalam rangka pengembangan pariwisata	%	7,4	PU BM
			5) Kondisi infrastruktur jalan/trotoar untuk pengembangan	%	50	

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
			pariwisata (KM)			
		2.13 Meningkatnya ak-sesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar	1) Persentase koperasi aktif	%	29	Dinas Koperasi UKM
			2) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	0	
			3) Jumlah BPR/LKM aktif (bh)	Unit	0	
			4) Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	0,03	
		2.14 Terwujudnya penge-lolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna	5) Prosentase pasar rakyat yang direvitalisasi	%	14,8	INDAG
			6) Prekuensi pengawasan barang dan jasa kelapangan	kali	1	
			7) Pelaku usaha industri kecil dan menengah yang dibina (orang)	orang	320	
			8) Pelaku usaha industri kecil dan menengah yang menyerap	orang	200	Indag

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				Target 2016	OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan			
			dan menerapkan teknologi tepat guna (TTG) (Org)				
		2.15 Meningkatkan pro-mosi kerjasama investasi	1) Jumlah peningkatan angka investasi	RP Trilyun	124	BPPMD	
			2) keluarga yang mengikuti Program transmigrasi (KK)	KK	25	Dinsosnakertran	
		2.16 Terwujudnya iklim investasi yang sehat	1) Lama proses perijinan (rata-rata)	Hari	5	BPPMD	
			2) Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha	Buah	5	SETDA	
			3) Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja	%	5	Dinsosnakertran	
			4) Peningkatan Penanganan Hubungan Industrial (%)	%	100	Dinsosnakertrans	
		2.17 Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan	1) Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap (ton)	ton	201,758	Disperinak	
		2.18 Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan	1) Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan	Dokumen	8	BAPPEDA	

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
		ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur	2) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Cianjur/Kota	Desa	10	TARKIM
		2.17 Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengeloaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	3) Ketaatan terhadap RTRW 1) Persentase berkurangnya penambang liar 2) Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku 3) Persentase jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembanguan yang dilengkapi dengan dokumen LH (AMDAL/UKL/UPL/SPPL)	% % %	100 75 50	BAPPEDA PSDAP
			4) RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata)	Buah	12	BLHD
			5) Persentase penanganan sampah (%)	%	5	TARKIM
			6) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	5	DKP
		2.18 Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh keterseediaan dan pemanfaatan infrastruktur yang handal	1) Kondisi infrastruktur jalan mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah (jaringan jalan strategis)	%	18,5	PU BM
			2) Raio Elektrifikasi Kab Cianjur	%	56,00	PSDAP
			3) Rumah layak huni	Unit	10.112	DISTARKIM
			4) Tersedianya data base jalan lingkungan dan jalan setapak	Kecamatan	32	

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama	
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016		
			5) Persentase terselenggaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintahan		%	80	DISHUBKOMINFO
			6) Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan		%	61,46	
			7) Persentase cakupan ketersediaan Dokumen Acuan Bahan Kebijakan Pelayanan Komunikasi dan Informatika		%	100	
			8) Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan kebijakan perhubungan		%	100	
			9) Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan		%	65,52	
			10) Persentase cakupan ketersediaan fasilitas		%	83	
			11) Efektivitas pelayanan angkutan		%	96,67	
			12) Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas		%	100	
			13) Persentase tingkat upaya kelalaian keselamatan kendaraan		%	100	
			14) Persentase cakupan keandalan prasarana dan		%	61,46	

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
			fasilitas			
			15) Luas Pemakaman Muslim dan non Muslim	-	-	DKP
			16) Luas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial	M2	20.000	SETDA
4	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	2.19 Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup	1) Berkurangnya lahan kritis	ha	1.550	DISHUTBUN
			2) Cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan	%	15,89	
		2.20 Terwujudnya dan terimplementasikan nya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiaan kewananan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta	1) Berkurangnya pelanggaran disiplin PNS (kasus)	Kasus	10	BKPPD

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
		berkhak mulia				
			2) Persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan	%	80	
			3) Persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu	%	100	
			4) Jumlah CPNS menjadi PNS	Org	300	
			5) Data base kepegawaian kabupaten yang terpelihara	Sistem	1	
			6) Pegawai yang mengikuti diklat teknis (orang)	Org	600	
			7) Anggota KORPRI yang terlayani	%	90	SEKRETARIAT DEWAN KORPRI
			8) Berkurangnya penyalahgunaan barang dan jasa	%	0	BPBJ
	2.21 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi		1) Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik	Ada/ tidak	ada	INSPEKTORAT DAERAH

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan			Target 2016	OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan		
		pemerintahan se-cara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal				
			2) Perda APBD tepat waktu	Tgl	31 Des	DPKAD
			3) Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tgl	31 Juli	
			4) Peningkatan pernyataan Opini BPK	WTP	WTP	
			5) Rasio belanja tidak langsung (belanja awal) terhadap total belanja daerah	Rasio	59,00	
			6) Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah	Rasio	41,2	
			7) Inventarisasi Aset	%	65	
			8) Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak	Rp	128.722.6+6.961	DINAS PAJAK
			9) Meningkatkan PAD	Rp	484.167.115594	DPKAD
			10) Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	BAPPEDA
			11) Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	ada	

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan			Target 2016	OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan		
			12) Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA;	Ada/tidak	Ada	
		2.22 Meningkatkan profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	1) Ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat	ada	ada	SETDA
			2) Kepemilikan KTP	%	95,65	Disduk Capil
			3) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Jiwa	504,91	
			4) Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	93,11	
			5) Kepemilikan akta catatan sipil	%	51,79	
			6) Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke Pemerintah Daerah berupa raperda eksekutif dan raperda inisiatif	Dok	18	Setwan
			7) Persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target lima tahun ke depan	%	100	SETDA

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
			8) Persentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target lima tahun ke depan (%)	%	-	SETDA
			9) Ketersediaan profil desa yang valid	Dok	-	BPMPPD
			10) Persentase sarana prasarana dasar desa yang memadai melalui partisipasi dan keswadayaan masyarakat perdesaan	%	100	BPMPPD
			11) Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di perdesaan	%	100	BPMPPD
			12) Kebijakan penataan wilayah	Dok	1	SETDA
			13) Kebijakan pemerintahan tentang desa (DOKUMEN)			
			14) Jumlah desa yang dapat menyalenggarakan pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusia/Perda/BPD	Desa	177	BPMPPD

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan			Target 2016	OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan		
			15) Jumlah desa yang dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Desa	354	BPMPPD
			16) Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif	%	100	SETDA
			17) Kebijakan Kerjasama Daerah	Dok	1	SETDA
			18) Kebijakan penyelesaian kasus hukum	Dok	5	SETDA
			19) Kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dok	3	SETDA
			20) Kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata	dok	1	SETDA SETDA
			21) Kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis	Dok	1	SETDA
			22) Kebijakan di bidang ketahanan pangan	Dok	1	SETDA
			23) Kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan	Dok	1	SETDA

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
			24) Kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan	Dok	1	SETDA
			25) Kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan	Dok	1	SETDA
			26) Kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan	Dok	1	SETDA
			27) Kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya dan pertambangan	Dok	1	SETDA
			28) Kebijakan pembangunan daerah	Dok	1	SETDA
			29) Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan kependidikan	Dok	1	SETDA
			30) Kebijakan di bidang pemuda dan olahraga	Dok	1	SETDA
			31) Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	Dok	1	SETDA
			32) Kebijakan di bidang Keluarga Berencana	Dok	1	SETDA
			33) Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dok	1	SETDA

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				Target 2016	OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Sasaran		
			34) Kebijakan Kesehatan	di bidang	Dok	1	SETDA
			35) Kebijakan ketenagakerjaan	di bidang	Dok	1	SETDA
			36) Kebijakan di bidang sosial		Dok	1	SETDA
			37) Kebijakan pengelolaan daerah	di bidang keuangan	Dok	1	SETDA
			38) Kebijakan pengelolaan daerah	di bidang barang/aset	dok	1	SETDA
			39) Kebijakan keperintahan	di bidang yang baik	Dok	1	SETDA
			40) Kebijakan pelayanan publik	di bidang	Dok	1	SETDA
			41) Kebijakan penyusunan SOP		Dok	5	SETDA
			42) Kebijakan pengawasan akuntabilitas	di bidang dan	Dok	-	SETDA
			43) Kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan		Dok	-	SETDA
			44) Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (OPD)		OPD	82	ARPUSDA
			45) Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip (unit)		unit	310	ARPUSDA

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
			46) Jumlah pengelola arsip	Orang	23	ARPUSDA
			47) Meningkatkan pelayanan administrasi	%	100	SETDA
			48) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	SETDA
			49) Meningkatkan SDM aparatur yg professional dan handal	%	100	SETDA
	2.23 Terwujudnya penerapan hukum, kepastian dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban dan kemananan yang kondusif		1) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertiban dan keindahaan)	Kasus	50	POL PP
			2) Pembinaan masyarakat dalam menciptakan suasana lingkungan yang kondusif	-	-	POL PP
	2.24 Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi		1) Cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi	bu	1	DISHUBKOMINFO

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
			2) Integrasi Sistem Informasi yang ada di OPD ke dalam (SIG) Kabupaten Cianjur	-	3	BAPPEDA
			3) Persentase cakupan ketersediaan media distribusi informasi (%)	%	100	DISHUBKOMINFO
			4) Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informatika	%	100	DISHUBKOMINFO
			5) Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi	%	100	DISHUBKOMINFO
			6) Persentase cakupan upaya bina jasa pos dan telekomunikasi	%	22	DISHUBKOMINFO
			7) Jumlah Pengadaan Barang / Jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan	%	0	BPEJ
			8) Tersedianya pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penangan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi	Dok	3	BPBD
	2.25 Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal		1) Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD	%	100	KECAMATAN/KELU RAHAN

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
		2.26 Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah	1) Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD	%	0	INSPEKTORAT
			2) Menurunnya angka perceraian (orang)	org	10	BKPPD
			3) Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh (Rp)	Rp	-	SETDA
			4) Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pemilukada	%	70	BADAN KESBANG
		2.27 pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara	1) Ketersediaan internalisasi akhlakul karimah	-	3	SETDA
		2.28 terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial	1) Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggaran dan kondisi trantibum) (Lokasi)	Kecamatan	32	SATPOL PP

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama	
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016		
			2) Persentase PMKS yang dibina	yang	%	25	DINSOSNAKERTRANS
			3) Persentase PSKS dibina	yang	%	100	DINSOSNAKERTRANS
			4.) Persentase pencegahan penanggulangan bencana alam dan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku (%)		%	100	BPBD

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya. Adapun penjabarannya dengan mempertimbangkan:

- Layanan dasar/wajib yang harus dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing OPD dan urusan;
- Permasalahan pembangunan kabupaten dan permasalahan urusan yang harus ditangani oleh OPD masing-masing;
- Usulan musrenbang kecamatan;
- Mempertimbangkan pembangunan sektor, lintas sektor dan pengembangan wilayah;
- Memperhatikan isu strategis, tema dan kebijakan tahun 2016;
- Prioritas pembangunan baik level nasional maupun provinsi;
- Kesesuaian dengan RPJMD, Renstra baik jenis program dan kegiatan.

Mengenai penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.

Rencana Program dan Kegiatan yang Prioritas bersifat menyeluruh yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2016, juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan sumber pembiayaan dari Provinsi, APBN Tahun 2016 dan sumber dana lainnya, Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 dimaksud, selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran ini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2016. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan tahun berjalan 2015. RKPD Tahun 2016 merupakan upaya memantapkan capaian Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2016, mengacu pada isu-isu strategis. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan prioritas serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan dilaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2016, kemudian Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, dan seluruh pelaku pembangunan di Cianjur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergis;
2. Berkaitan dengan upaya penggalan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi seluruh stakeholders untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh OPD, BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2015. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2015 menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun 2016.
4. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2016 dan penyelenggaraan MUSRENBANG serta Forum OPD Tahun 2015, mengacu pada peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.

Mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya;

5. RKPD Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### **6.2. Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RKPD Tahun 2016, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menyusun RAPBD Tahun 2016, RKPD Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Cianjur;
2. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2016;
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan, difasilitasi melalui Forum OPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi;
4. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap OPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2016, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui BAPPEDA dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Cianjur;
5. Secara proaktif, BAPPEDA Kabupaten Cianjur, wajib melakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan RKPD Tahun 2016 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing OPD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 29 Mei 2015  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**